



**PENYERAPAN TENAGA KERJA DI INDONESIA DENGAN
PERSPEKTIF MAKRO EKONOMI**

SKRIPSI

Oleh:

**Halimatus Putrya
NIM 140810101048**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**PENYERAPAN TENAGA KERJA DI INDONESIA DENGAN
PERSPEKTIF MAKRO EKONOMI**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

**Halimatus Putrya
NIM 140810101048**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Hj. Endang Nur Wulan dan Ayahanda H. Khamim tercinta atas segala dukungan baik dalam doa, kasih sayang, semangat, dan pengorbanan yang tak terhingga kepada penulis;
2. Guru-guru sekolahku dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, serta guru-guru tercintaku yang selalu memberikan sumbangsih ilmu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan;
3. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

“So be patient. Indeed, the promise of Allah is true.”

(Ar-Rum 30:60)

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Verily, with every difficulty, there is relief.”

(Al-Inshirah 94:5)

“All our dreams can come true, if we have the courage to persue them.”

(Walt Disney)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Halimatus Putrya

NIM : 140810101048

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia dengan Perspektif Makro Ekonomi” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 02 April 2018

Yang menyatakan,

Halimatus Putrya

NIM 1408101011048

SKRIPSI

**PENYERAPAN TENAGA KERJA DI INDONESIA DENGAN
PERSPEKTIF MAKRO EKONOMI**

Oleh

Halimatus Putrya
NIM 140810101048

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Siti Komariyah, S.E., M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Herman Cahyo D., S.E., M.P

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Dengan Perspektif
Makro Ekonomi
Nama Mahasiswa : Halimatus Putrya
NIM : 1140810101048
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya Manusia
Tanggal Persetujuan : 02 April 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Siti Komariyah, S.E., M.Si
NIP. 197106102001122002

Dr. Herman Cahyo D., S.E., M.P
NIP. 197207131999031001

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphindrartin, M.Kes
NIP. 196411081989022001

PENGESAHAN

Judul Skripsi

**PENYERAPAN TENAGA KERJA DI INDONESIA DENGAN
PERSPEKTIF MAKRO EKONOMI**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Halimatus Putrya

NIM : 140810101048

Jurusan : Ilmu Ekonomi

telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Drs. Petrus Edi Suswandi, M.P (.....)
NIP. 195504251985031001
2. Sekertaris : Drs. Sunlip Wibisono, M.Kes (.....)
NIP. 195812061986031003
3. Anggota : Fivien Muslihatinningsih, S.E, MSi (.....)
NIP. 198301162008122001

Mengetahui/Menyetujui,
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.,CA
NIP. 19710727199512101

Halimatus Putrya

*Jurusan Ilmu Ekonomi Studi dan Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Jember*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penanaman Modal Asing, Ekspor, dan Inflasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel, data yang digunakan berupa *time series* (tahun 2007-2016) dan *cross section* (33 Provinsi di Indonesia). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan jurnal sebagai pendukung. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi linier data panel dengan metode *Fixed Effect* digunakan alat bantu software Eviews 9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, variabel penanaman modal asing dan ekspor memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia tahun 2007-2016, akan tetapi inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan penyerapan tenaga kerja di Indonesia tahun 2007-2016.

Kata kunci: Penanaman Modal Asing, Ekspor, Inflasi, Penyerapan Tenaga Kerja.

Employment in Indonesia with Macroeconomic Perspective

Halimatus Putrya

*Development Economics Departemen, Faculty of Economics,
University of Jember*

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Foreign Investment, Export, and Inflation on Employment Absorption in Indonesia. This research is a quantitative research using panel data, the data used in the form of time series (2007-2016) and cross section (33 Provinces in Indonesia). The type of data used in this study is secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS) and the journal as a supporter. The analytical method used is linear regression analysis method of panel data with Fixed Effect method used Eviews 9 software tool. The results showed that, foreign and export investment variables have a positive and significant influence on employment in Indonesia in 2007-2016, will but inflation has a negative and significant effect on employment in Indonesia in 2007-2016.

Key words: Foreign Direct Investment, Export, Inflation, Employment.

RINGKASAN

Penanaman Modal Asing, Ekspor, dan Inflasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2007-2016; Halimatus Putrya; 140810101048; 2018; Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam (SDA) berlimpah baik kekayaan alam yang dimiliki mulai dari daratan hingga di lautannya. Potensi tersebut juga didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang tinggi secara kuantitasnya. Namun, dengan kekayaan yang dimiliki dari kedua sumber daya tersebut belum tentu menjamin terjadinya pembangunan ekonomi secara merata di Indonesia. Kenyataannya masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan karena tidak memiliki pekerjaan atau disebut dengan pengangguran karena terbatasnya tingkat penyerapan tenaga kerja di Indonesia (Siagian, 2015). Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kunci dalam reformasi ekonomi, dimana suatu negara harus mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global agar dapat menciptakan pembangunan yang berhasil (Katryn, 2015).

Menurut Kuncoro (2012:73) tenaga kerja merupakan faktor yang sangat krusial bagi pembangunan ekonomi di setiap negara. Tujuan peningkatan penyerapan tenaga kerja seiring menjadi prioritas dalam pembangunan suatu negara. Mengingat penyerapan tenaga kerja menimbulkan beberapa dampak yang lain seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat melalui upah yang didapat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemiskinan, dan mengantisipasi masalah sosial lainnya. Penyerapan tenaga kerja atau biasa disebut sebagai *pro-job* menjadi agenda penting selain *pro-poor* (pengentasan kemiskinan), dan *pro-growth* (peningkatan pertumbuhan).

Penyerapan tenaga kerja di Indonesia tidak terlepas dari faktor makro ekonomi salah satunya dipengaruhi oleh investasi atau penanaman modal. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Indonesia membutuhkan modal baik

dalam maupun luar negeri. Arus investasi atau penanaman modal yang masuk akan mengembangkan produksi dalam negeri sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi seiring dengan peningkatan tenaga kerja. Penanaman modal menurut Peraturan Presiden No. 39 tahun 2014 tentang Penanaman Modal dapat diartikan sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai koefisien regresi variabel penanaman modal asing sebesar 264.5264 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, artinya setiap kali penanaman modal asing mengalami peningkatan sebesar koefisien 264.5264, maka penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan. Nilai koefisien regresi ekspor sebesar 34.24156 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, artinya setiap kali ekspor mengalami peningkatan sebesar koefisien 34.24156, maka penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan. Nilai koefisien regresi variabel variabel inflasi sebesar -12077.32 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,0036 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, artinya setiap kali inflasi mengalami peningkatan sebesar koefisien 12077.32, maka penyerapan tenaga kerja mengalami penurunan.

Kesimpulan dari skripsi ini menunjukkan bahwa penanaman modal asing, ekspor, dan inflasi memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia tahun 2007-2014. Namun inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia tahun 2007-2014.

PRAKATA

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Dengan Perspektif Makro Ekonomi” Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa motivasi, nasehat, saran maupun kritik yang membangun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Siti Komariyah, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing I yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik dan pengarahan dengan penuh keikhlasan, ketulusan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Dr. Herman Cahyo D., S.E., M.P. selaku dosen pembimbing II yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik dan pengarahan dengan penuh keikhlasan, ketulusan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Drs. Sunlip Wibisono, M.Kes. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) selama kuliah terimakasih atas bimbingannya selama penulis menjadi mahasiswa;
4. Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.,CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
5. Dr. Sebastiana Viphindaratin, M.Kes. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi;
6. Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, terimakasih atas bimbingan dan pelayanannya selama penulis menjadi mahasiswa;
7. Ibunda Hj. Endang Nur Wulan dan Ayahanda H. Khamim yang telah membimbing dari kecil hingga dewasa;

8. Ekha May Ayu B.A. dan Dian Agung Raharja Prawira selaku kakak kandung penulis yang telah memberikan doa, dukungan, serta motivasi;
9. Achmad Reza yang telah memberikan dukungan, motivasi serta bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi;
10. Ratna Wulan rekan terbaik sejak SMA hingga saat ini terimakasih atas dukungan dan motivasinya;
11. Rekan-rekan terbaik penulis di Jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2014 Nurma Kamelia, Hendra Hadi, Bagus Suryo, Ma'ruf Hanuraga, Razan Febri, Dea Magdalena, Gita Triya, Miranda Luftisari, Wardatul Lutfiana, Triana Wulandari, Devira N, Hermin Purnamasari, Nur Ari Santi terimakasih atas motivasinya;
12. Rekan-rekan KKN 37 Desa Pondokrejo Kec. Tempurejo Kab. Jember;
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, penulis menyadari atas kekurangan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan bagi penyempurnaan tugas akhir ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi penulisan karya tulis selanjutnya. Amin.

Jember, 02 April 2018

Penulis

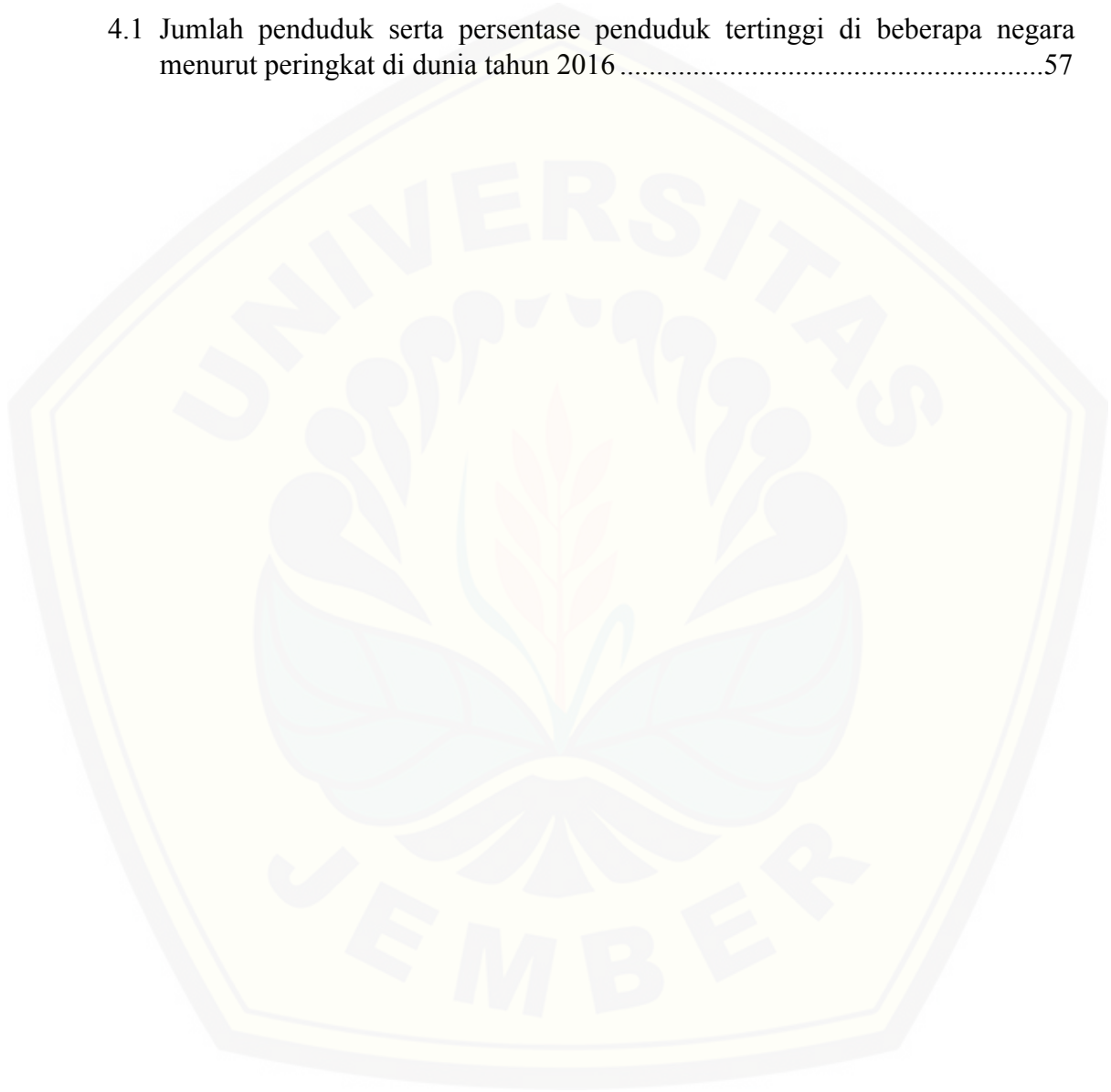
DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI	vi
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	14
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Landasan Teori.....	15
2.1.1 Tenaga Kerja.....	15
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	17
2.1.3 Penyerapan Tenaga Kerja	18
2.1.4 Investasi	21
2.1.5 Penanaman Modal Asing	25
2.1.6 Ekspor	29

2.1.7 Inflasi	31
2.2 Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen	34
2.3 Penelitian Terdahulu	38
2.4 Kerangka Konseptual.....	45
2.5 Hipotesis	46
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	47
3.1 Jenis Penelitian.....	47
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	47
3.3 Spesifikasi Model.....	48
3.4 Metode Analisis	49
3.4.1 Pengujian Model Penelitian	50
3.5 Uji Statistik	52
3.5.1 Uji F	52
3.5.2 Uji T	52
3.5.3 Koefisien Determinasi	53
3.5.4 Uji Asumsi Klasik.....	54
3.6 Definisi Operasional	54
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	56
4.1 Kondisi Penduduk Indonesia	56
4.2 Kondisi Perekonomian Indonesia	57
4.3 Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia.....	57
4.4 Perkembangan Penanaman Modal Asing di Indonesia.....	61
4.5 Perkembangan Ekspor di Indonesia.....	64
4.6 Perkembangan Inflasi di Indonesia.....	67
4.7 Hasil Analisis.....	70
4.8 Hasil Uji Statistik.....	73
4.9 Pembahasan.....	75
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN.....	89
5.1 Kesimpulan	89
5.2 Saran	89
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN.....	107

DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu	41
4.1 Jumlah penduduk serta persentase penduduk tertinggi di beberapa negara menurut peringkat di dunia tahun 2016	57

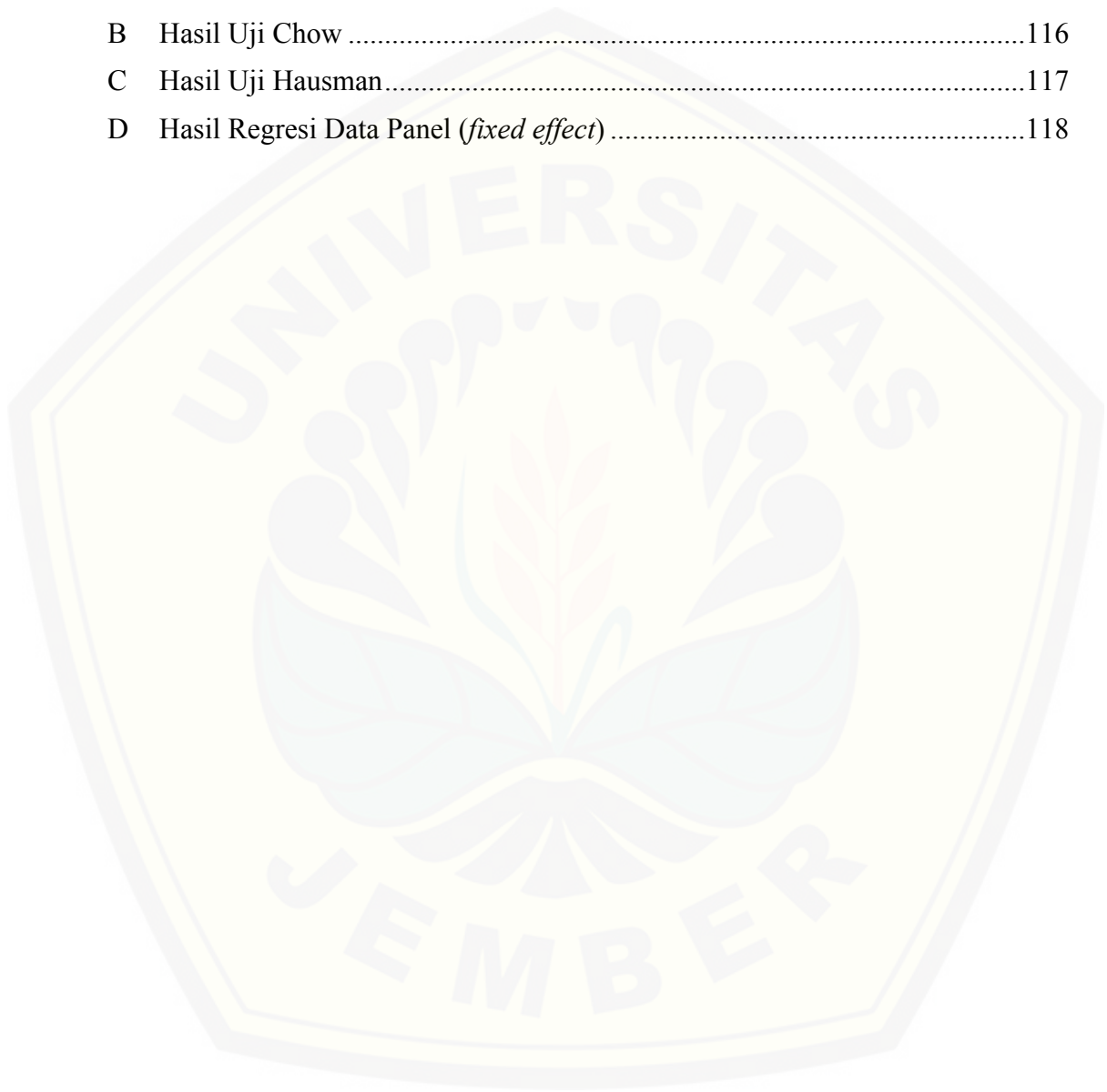


DAFTAR GAMBAR

1.1 Pencari Kerja Terdaftar, Lowongan Kerja Terdaftar, dan Penempatan atau Pemenuhan Tenaga Kerja Indonesia.....	2
1.2 Penduduk Angkatan Kerja, Bekerja, dan Pengangguran di Indonesia	3
1.3 Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing Langsung Indonesia	5
1.4 Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Provinsi	8
1.5 Nilai Ekspor Indonesia.....	10
1.6 Inflasi Indonesia.....	11
4.1 Persentase Perkembangan PDB Indonesia.....	55
4.2 Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia.....	59
4.3 Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia.....	63
4.4 Perkembangan Nilai Ekspor Indonesia.....	66
4.5 Perkembangan Inflasi di Indonesia.....	68
4.6 Penanaman Modal Asing Menurut Sektor Ekonomi	79
4.7 Penyerapan Tenaga Kerja dan Ekspor Indonesia.....	84
4.8 Penyerapan Tenaga Kerja dan Inflasi Indonesia.....	87

DAFTAR LAMPIRAN

A	Data Penyerapan Tenaga Kerja, PMA, Ekspor, dan Inflasi.....	107
B	Hasil Uji Chow	116
C	Hasil Uji Hausman.....	117
D	Hasil Regresi Data Panel (<i>fixed effect</i>)	118



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam (SDA) berlimpah baik kekayaan alam yang dimiliki mulai dari daratan hingga di lautannya. Potensi tersebut juga didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang tinggi secara kuantitasnya. Namun, dengan kekayaan yang dimiliki dari kedua sumber daya tersebut belum tentu menjamin terjadinya pembangunan ekonomi secara merata di Indonesia. Kenyataannya masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan karena tidak memiliki pekerjaan atau disebut dengan pengangguran karena terbatasnya tingkat penyerapan tenaga kerja di Indonesia (Siagian, 2015).

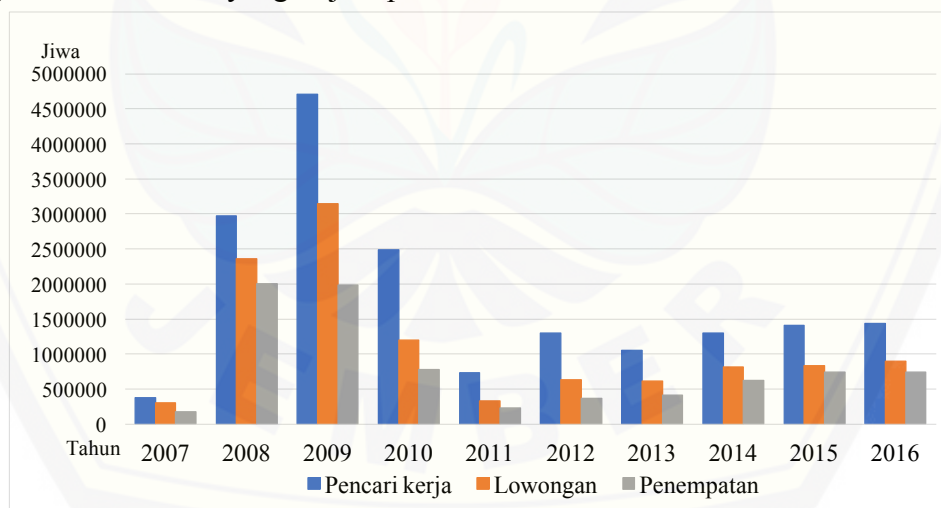
Indonesia dengan jumlah penduduk 261,1 juta jiwa pada tahun 2016 dan jumlah angkatan kerja sebanyak 127,8 juta jiwa. Berdasarkan data tersebut hal itulah yang menyebabkan pengangguran di Indonesia muncul karena ketimpangan antara jumlah angkatan kerja atau pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia yang mampu menyerapnya (Badan Pusat Statistik, 2016). Tenaga kerja dapat dikatakan sebagai masalah yang serius karena berkaitan dengan kemanusiaan (Haris, 2015). Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kunci dalam reformasi ekonomi, dimana suatu negara harus mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global agar dapat menciptakan pembangunan yang berhasil (Katryn dan Anggraini, 2015).

Menurut Kuncoro (2012:73) tenaga kerja merupakan faktor yang sangat krusial bagi pembangunan ekonomi di setiap negara. Tujuan peningkatan penyerapan tenaga kerja seiring menjadi prioritas dalam pembangunan suatu negara. Mengingat penyerapan tenaga kerja menimbulkan beberapa dampak yang lain seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat melalui upah yang didapat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemiskinan, dan mengantisipasi masalah sosial lainnya. Penyerapan tenaga kerja atau biasa disebut

sebagai *pro-job* menjadi agenda penting selain *pro-poor* (pengentasan kemiskinan), dan *pro-growth* (peningkatan pertumbuhan).

Di dalam teori Cobb Douglas, dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara berasal dari peningkatan *input* tenaga kerja, modal, dan teknologi. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi suatu negara sering menjadi prioritas utama dalam proses pembangunan sehingga diharapkan dapat memicu pertumbuhan penyerapan *input* produksi salah satunya tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan salah satu indikator yang sangat penting bagi penyerapan tenaga kerja. Hal ini disebabkan karena permintaan dari tenaga kerja merupakan turunan dari permintaan *output*. Sehingga secara logika terjadi pergerakan yang sama antara pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan permintaan *output* dengan penyerapan tenaga kerja (Smith dan Todaro, 2003:40).

Berikut dibawah ini akan dipaparkan gambar 1.1 data Pencari Kerja Terdaftar, Lowongan Kerja Terdaftar, dan Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2007-2016 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik beserta penjelasan fenomena yang terjadi pada tahun tersebut.



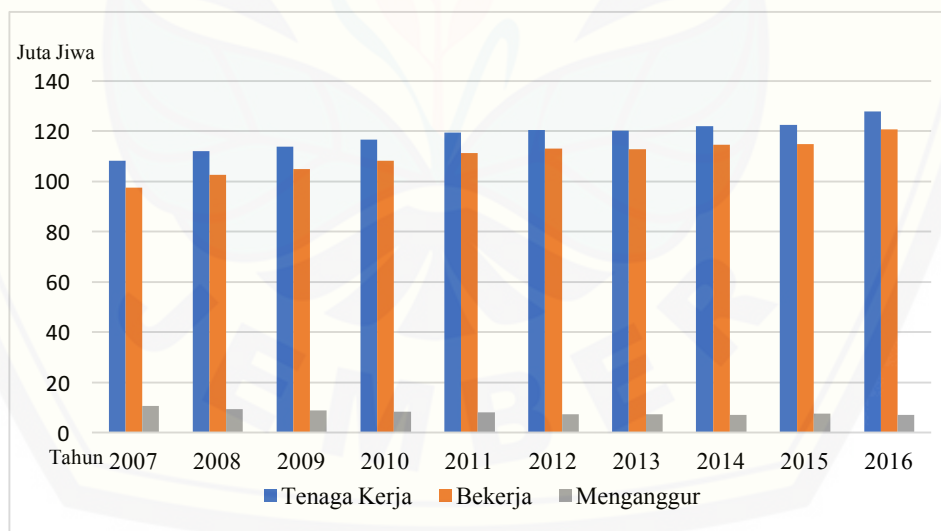
Gambar 1.1 Grafik Pencari Kerja Terdaftar, Lowongan Kerja Terdaftar, dan Penempatan atau Pemenuhan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2007-2016.

Sumber: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2017.

Gambar 1.1 menggambarkan jumlah pencari kerja, lowongan kerja terdaftar, dan penempatan tenaga kerja di Indonesia dari tahun 2007 hingga 2016. Grafik di atas mengalami kenaikan tertinggi pencari kerja yang terjadi pada tahun 2009

hingga mencapai 4,7 juta jiwa. Hal tersebut disebabkan oleh krisis global di Amerika Serikat pada tahun 2008 yang kemudian berimbas pada beberapa negara di dunia termasuk Indonesia. Sebagai contoh tenaga kerja Indonesia (TKI) dipulangkan oleh Malaysia guna memprioritaskan tenaga kerja lokal. Dengan dikembalikannya tenaga kerja ke Indonesia menyebabkan pencari kerja, lowongan, dan penempatan kerja di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pemerintah berupaya dengan berbagai kebijakan berusaha untuk mengatasi dampak krisis global tersebut sehingga lowongan tenaga kerja pada tahun 2011 hingga 2016 perubahan yang terjadi tidak terlalu timpang. Meskipun setelah tahun 2010 sudah kembali stabil, selisih pencari kerja dengan yang diterima kerja masih cukup besar karena lapangan pekerjaan atau kesempatan kerja yang belum mencukupi. Dan apabila hal ini terus berlanjut maka tingkat pengangguran Indonesia akan terus meningkat (Cyvers dan Soeng, 2011).

Berikut dibawah ini akan dipaparkan gambar 1.2 data Penduduk Angkatan Kerja, Bekerja dan Pengangguran di Indonesia Tahun 2007-2016 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik beserta penjelasan fenomena yang terjadi.



Gambar 1.2 Grafik Penduduk Angkatan Kerja, Bekerja, dan Pengangguran di Indonesia Tahun 2007-2016.

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017.

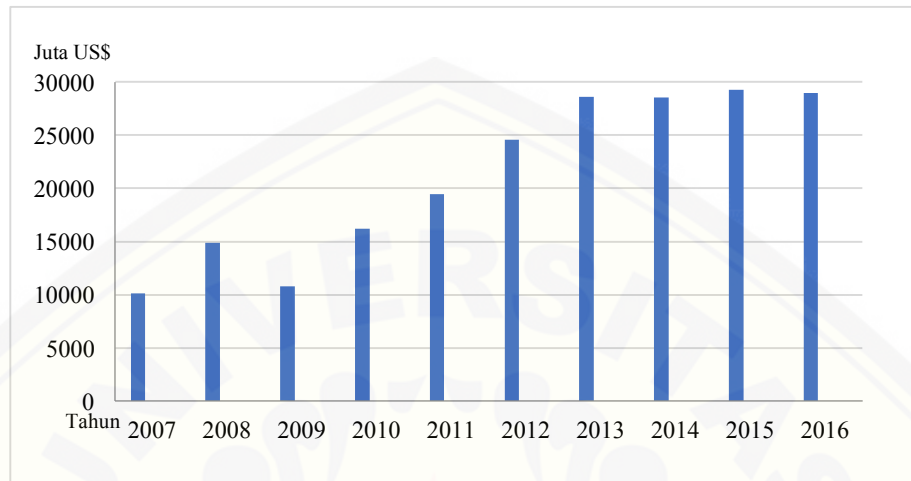
Berdasarkan gambar 1.2 data yang menggambarkan penduduk angkatan kerja, orang bekerja, dan pengangguran di Indonesia. Dapat kita amati, tren orang bekerja meningkat setiap tahunnya namun jumlah angkatan kerja juga meningkat,

sehingga selisih jumlah orang yang bekerja dan jumlah angkatan kerja menimbulkan pengangguran. Peningkatan yang terjadi disebabkan oleh penduduk di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2007 sebanyak 10,55 juta orang. Dalam hal ini pemerintah bukan tidak berhasil untuk mengurangi jumlah pengangguran, karena dari tahun 2008 sampai dengan 2012 tren pengangguran terus menurun walaupun pada tahun berikutnya mengalami kenaikan lalu mengalami penurunan lagi. Menurut Badan Pusat Statistik (2012) menurunnya angka pengangguran ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah dalam hal investasi.

Penyerapan tenaga kerja di Indonesia tidak terlepas dari faktor makro ekonomi salah satunya dipengaruhi oleh investasi atau penanaman modal. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Indonesia membutuhkan modal baik dalam maupun luar negeri. Arus investasi atau penanaman modal yang masuk akan mengembangkan produksi dalam negeri sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi seiring dengan peningkatan tenaga kerja. Penanaman modal menurut Peraturan Presiden No. 39 tahun 2014 tentang Penanaman Modal dapat diartikan sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia.

Menurut UU No. 11 tahun 1970, penanaman modal asing merupakan alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari devisa Indonesia atau alat-alat untuk perusahaan yang dimasukkan dari luar ke dalam negeri yang tidak dibiayai oleh devisa Indonesia. Penanaman modal asing menjadi penting bagi Indonesia dalam: mendorong kinerja laju pertumbuhan ekonomi Indonesia; mendorong timbulnya industri pasokan bahan baku lokal; proses alih teknologi dan manajemen; perkembangan kolaborasi yang saling menguntungkan antara investor asing dan lokal; meningkatkan kegiatan usaha yang berorientasi ekspor; peningkatan sumber-sumber pajak untuk pembangunan pusat dan lokal dalam meningkatkan penyelenggaraan fasilitas umum dan sosial; serta konsumsi lokal terhadap kebutuhan pokok (Chandra, 2006).

Berikut dibawah ini akan dipaparkan gambar 1.3 data Penanaman Modal Asing Langsung Indonesia Tahun 2007-2016 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik beserta penjelasan fenomena yang terjadi pada tahun tersebut.



Gambar 1.3 Grafik Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing Langsung Indonesia Tahun 2007-2016. (Juta US\$)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017.

Berdasarkan gambar 1.3, nilai investasi terendah pada tahun 2009 dikarenakan efek dari terjadinya krisis ekonomi global Amerika Serikat (AS) pada tahun 2008. Salah satu komponen penggerak investasi adalah penanaman modal asing. Krisis global menyebabkan likuiditas dana negara-negara berkembang semakin menyusut. Menyusutnya dana tersebut, menyebabkan negara-negara maju berupaya menarik investasinya di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Konfigurasi perekonomian global inilah yang banyak mewarnai perjalanan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2008 hingga 2016. Krisis likuiditas di negara-negara maju ini menyebabkan sumber pendanaan yang menggerakkan perekonomian berkurang, dan pada gilirannya akan menyebabkan sumber turunya pertumbuhan ekonomi. Sebagai lanjutan dari krisis global tersebut, pertumbuhan ekonomi *advanced economies* turun menjadi -1.8% di tahun 2009 menurut IMF (*World Economic Outlook Database*, 2010).

Meskipun perekonomian Yunani tidak besar, namun berpotensi menyebabkan efek menular (*contagion effect*) ke negara-negara berkembang (dan juga *emerging market*) melalui 2 saluran utama. *Pertama*, lambatnya pertumbuhan ekonomi negara-negara maju akan menyebabkan ekspor negara-negara

berkembang menjadi berkurang. *Kedua*, krisis likuiditas negara-negara maju menyebabkan investor di negara-negara maju menarik aliran dananya yang ditanamkan dinegara-negara berkembang, atau terjadi *capital outflow* di negara-negara berkembang karena negara-negara maju kesulitan likuiditas (Sriwardiningsih, 2010).

Akibat dari krisis ekonomi global ini, andalan ke depan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi di tahun 2010 adalah dari sisi permintaan dalam negeri. Salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan dalam negeri adalah mendorong investasi. Walaupun investasi pada tahun 2009 hanya mampu tumbuh sebesar 3,3% dan diproyeksikan di tahun 2010 akan mencapai 8,8% - 9,3%, dengan adanya kondisi perbaikan sektor riil (Badan Pusat Statistik, 2010).

Untuk mendorong investasi ini, pemerintah berupaya melakukan kebijakan moneter dan fiskal. Pemerintah telah mulai menurunkan suku bunga. Pemerintah telah membuat paket stimulus fiskal dalam upaya mendorong investasi, antara lain memberikan stimulus fiskal dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat dan memberikan potongan pajak. Selain itu, berbagai perbaikan di sektor riil yang secara konsisten dijalankan oleh pemerintah juga memberikan kontribusi signifikan dalam perbaikan iklim investasi. Keberhasilan dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif juga akan memberi dampak positif lain, yaitu membaiknya aliran masuk modal asing global masuk ke Indonesia yang pada gilirannya diperkirakan dapat menyerap tenaga kerja dan turut membawa inovasi maupun teknologi baru (Sriwardiningsih, 2010).

Penanaman modal asing langsung atau *Foreign Direct Investment* (FDI) berperan dalam perkembangan ekonomi suatu negara. FDI sebagai elemen kunci globalisasi dan ekonomi dunia dapat menggerakkan tenaga kerja, kemajuan teknologi, peningkatan produktivitas, dan terutama pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini telah ditandai sejak abad ke-19 dan ke-20 dimana terjadi asosiasi antara kemajuan ekonomi dengan kebebasan politik sehingga menjadi awal terjadinya globalisasi. Di negara berkembang, FDI memiliki peranan yang vital dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Kondisi ini dapat dilihat

pada beberapa dekade terakhir dimana perdagangan bebas memicu pertumbuhan FDI dan memberikan dampak positif untuk pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Oleh sebab itu, penanaman modal asing langsung ini dipercaya dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi dan sosial. Sebagai contoh, FDI memberikan dampak positif yang kuat dalam pasar tenaga kerja dimana memberikan keuntungan pada penurunan angka pengangguran di negara bersangkutan. Berdasarkan dampak positif tersebut, proses dan keputusan politik sering mendukung rencana penanaman modal asing yang diberikan oleh para investor internasional sebagai salah satu cara mendukung kondisi finansial negara (Sidki, 2016).

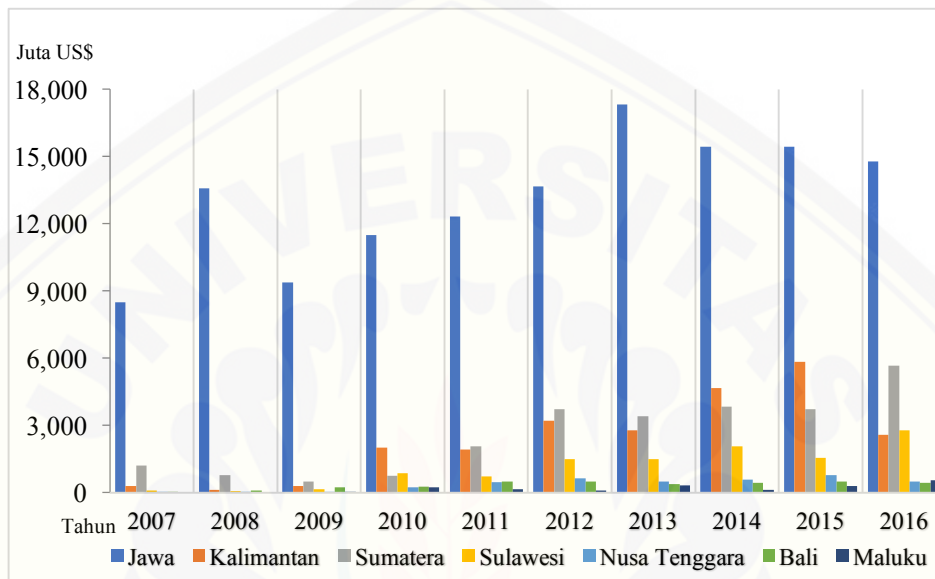
Terdapat potensi keuntungan adanya FDI yaitu di antaranya adalah dengan adanya aliran FDI yang masuk, maka diharapkan jumlah pengangguran di dalam negeri dapat terserap oleh lahan pekerjaan baru yang tercipta dari adanya FDI tersebut. Akan tetapi, dijelaskan juga bahwa proses FDI tetap harus diawasi oleh pemerintah karena terdapat suatu risiko yang justru dapat meningkatkan angka pengangguran. Pendapat tersebut didasarkan pada kondisi negara berkembang ketika suatu perusahaan asing yang masuk menggunakan teknik produksi bersifat *capital-intensive*, sehingga kurang sesuai apabila digunakan di negara berkembang yang mayoritas memiliki jumlah tenaga kerja melimpah (Appleyard *et al.* 2008).

Berbeda dengan penelitian Rizvi dan Nishat (2009) yang menemukan bahwa FDI tidak memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga. Dari tiga negara yang diteliti, yaitu Cina, India, dan Pakistan, hanya negara Cina yang menunjukkan FDI berdampak terhadap jumlah tenaga kerja yang terserap. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa FDI tidak dapat diharapkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan di suatu negara, sehingga diperlukan ukuran-ukuran lain untuk merangsang terciptanya suatu lapangan pekerjaan.

Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa aliran masuk penanaman modal asing masih sangat terpusat di pulau Jawa, yang menerima 70 hingga 90 persen aliran penanaman modal asing setiap tahun. Di pulau Jawa pun, penanaman modal asing lebih terpusat di

ibukotanya, Jakarta, dan pada bagian Barat dari pulau (Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2016).

Berikut dibawah ini akan dipaparkan gambar 1.4 data Penanaman Modal Asing Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2007-2016 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik beserta penjelasan fenomena yang terjadi pada tahun tersebut.



Gambar 1.4 Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Provinsi Tahun 2007-2016 (juta US\$)

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2017.

Pada tahun 2010 investasi tertinggi berada di wilayah Jawa dengan nilai investasi sebesar USD 11,499 milyar. Dan jumlah nilai investasi terendah adalah Maluku yaitu sebesar USD 249 juta. Selanjutnya, pada tahun 2011 data investasi asing yang masuk ke Indonesia tidak mengalami perubahan yang berarti dimana wilayah Jawa tetap menjadi tujuan terbesar investasi, namun nilai investasi menurun menjadi USD 5,326 milyar. Sedangkan nilai investasi terendah tetap berada di Maluku dengan nilai investasi USD 130 juta. (Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2016)

Wilayah Jawa memiliki nilai investasi tertinggi karena faktor pendukung seperti tersedianya tenaga kerja, terjaminnya keamanan dan infrastruktur yang lebih memadai untuk berinvestasi. Hal tersebut tentu berbeda dengan wilayah lainnya seperti Maluku yang infrastruktur dan jaminan keamanan investasi yang tidak sebaik di daerah Jawa, sehingga minat investor masih sedikit. Sehingga dari grafik

di atas dapat disimpulkan bahwa belum meratanya persebaran investasi di Indonesia (Sidki, 2016).

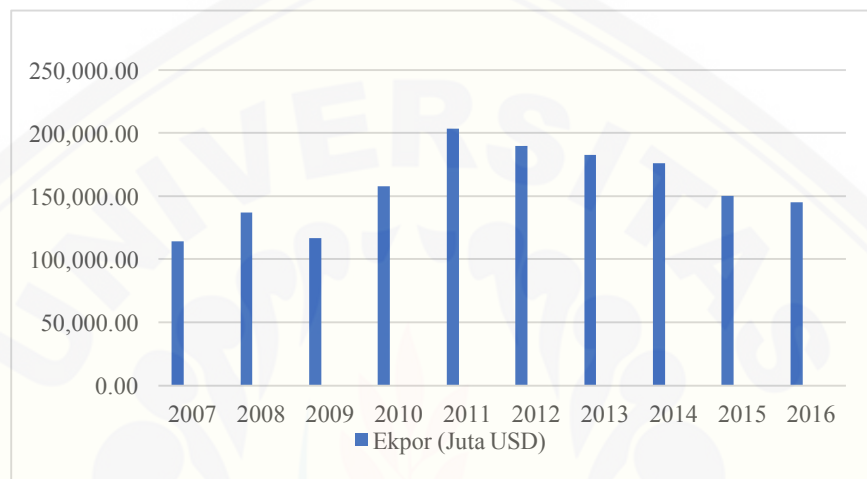
Investasi langsung yang meningkat juga tercermin pada perkembangan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) yang tercatat positif di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Data perkembangan realisasi PMA yang dipublikasikan oleh BKPM pada 2016 mencatat peningkatan sebesar 8,4%, yaitu dari Rp 365,9 triliun menjadi Rp 396,6 triliun. Nilai realisasi PMA tersebut setara dengan 29 miliar dolar AS. Secara sektoral, BKPM mencatat realisasi PMA terkonsentrasi pada sektor industri logam dasar, barang logam, mesin dan elektronik; serta sektor industri kimia dasar, barang kimia dan farmasi dengan pangsa masing-masing sektor tersebut sebesar 13,4% dan 10% dari total PMA. Selain itu, investasi PMA juga cukup besar ke sektor industri kertas, barang dari kertas dan percetakan (pangsa 9,6%), sektor pertambangan (pangsa 9,5%) dan sektor industri alat angkutan dan transportasi lainnya (pangsa 8,2%) (Bank Indonesia, 2016).

Penanaman modal asing dipandang sebagai cara yang lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara. Penanaman modal asing dapat memberikan kontribusi yang lebih baik ke dalam proses pembangunan. Indonesia berusaha memberikan insentif untuk aliran modal asing ini. Dengan perekonomian Indonesia yang semakin terbuka, imbas krisis keuangan Eropa dikhawatirkan dapat melebar tidak hanya di negara-negara kawasan Eropa serta negara maju, tetapi juga berimbas di negara-negara *emerging market*, tidak terkecuali Indonesia. *Capital Inflow* yang masuk ke negara *emerging market* lebih didominasi oleh *portofolio investment* yang bersifat jangka pendek dibanding *Foreign Direct Investment* (FDI). Krisis ini akan berdampak terhadap perekonomian domestik dan berimbas pada kinerja sektor riil. Volume dan nilai ekspor mengalami tekanan, pendapatan perusahaan mengalami penurunan, yang pada akhirnya akan berdampak pada pasar tenaga kerja (Kemenkeu, 2013).

Kegiatan ekspor akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Dengan semakin luasnya pasar bagi produk Indonesia, kegiatan produksi di dalam negeri akan meningkat. Semakin banyak pula tenaga kerja yang dibutuhkan sehingga

lapangan kerja semakin luas. Terlebih perdagangan antarnegara dapat menambah penerimaan devisa negara. Dengan demikian, kekayaan negara bertambah karena devisa merupakan salah satu sumber penerimaan negara (Yulia, 2015).

Berikut dibawah ini akan dipaparkan gambar 1.4 data Ekspor menurut FOB di Indonesia Tahun 2007-2016 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik beserta penjelasan fenomena yang terjadi pada tahun tersebut.



Gambar 1.5, Grafik Nilai Ekspor Indonesia Tahun 2007-2016

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017.

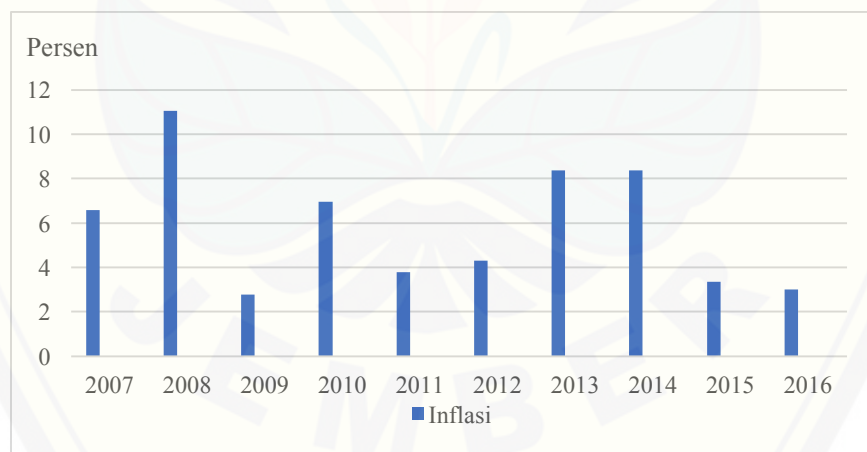
Berdasarkan gambar 1.6 dapat diketahui bahwa nilai ekspor terendah terjadi pada tahun 2009 dan 2013. Nilai ekspor Indonesia rendah pada tahun 2009 karena dampak dari krisis ekonomi global AS pada tahun 2008. Selanjutnya, menurunnya nilai ekspor disebabkan oleh kondisi perekonomian tahun 2013 yang masih dibayang-bayangi krisis Eropa, dan melemahnya perekonomian AS serta Cina, akan berimbas pada melemahnya permintaan ekspor Indonesia. Kondisi ini telah mulai terlihat pada ekspor tahun 2012 yang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya (Wibowo, 2013).

Meskipun kondisi perekonomian global mengalami penurunan, perekonomian Indonesia pada tahun 2012 mampu tumbuh 6,2%. Dari sisi sektoral, sektor padat tenaga kerja seperti pertanian dan industri tumbuh lebih lambat dibanding sektor padat modal seperti sektor pengangkutan dan telekomunikasi. Kondisi ini tentu menjadi tantangan bagi pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja (Kemendag, 2013).

Salah satu indikator makro yang digunakan untuk melihat atau mengukur stabilitas perekonomian suatu negara adalah inflasi. Perubahan dalam indikator ini akan berdampak terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif ekonomi, inflasi merupakan fenomena moneter dalam suatu negara dimana naik turunnya inflasi cenderung mengakibatkan terjadinya gejolak ekonomi (Silvia dan Aimon, 2013).

Tujuan utama dari kebijakan ekonomi makro adalah untuk memecahkan masalah inflasi sebagai penyebab terjadinya ketidakstabilan harga dan untuk memecahkan masalah pengangguran. Jadi kebijakan makro harus dapat mencapai sasarannya, yaitu menciptakan stabilitas harga dan dalam waktu bersamaan menciptakan kesempatan kerja. Inflasi sebagai salah satu dinamika perekonomian adalah diprioritaskan pemerintah sebab dampaknya langsung terasa di masyarakat (Ikhsan, 2010).

Berikut dibawah ini akan dipaparkan gambar 1.4 data Inflasi (umum) di Indonesia Tahun 2007-2016 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik beserta penjelasan fenomena yang terjadi pada tahun tersebut.



Gambar 1.6, Grafik Inflasi Indonesia Tahun 2007-2016.

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017.

Penyumbang inflasi terbesar pada tahun 2008 ini adalah lebih banyak dari sisi *cost push inflation*. Meningkatnya harga minyak dunia yang akhirnya memaksa Pemerintah untuk menaikkan harga BBM pada bulan Mei 2008 memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap tingkat inflasi, walaupun efek kenaikan harga BBM tersebut sudah tidak signifikan lagi pada bulan Juli 2008. Selain itu,

meningkatnya harga komoditas pangan dunia (kebutuhan bahan pangan impor seperti kedelai, jagung dan terigu), sejak akhir tahun 2007 yang otomatis meningkatkan biaya pokok produksi perusahaan juga memberikan kontribusi angka inflasi yang sangat besar. Hal-hal lain seperti kelangkaan sumber energi baik gas maupun minyak di berbagai daerah maupun kekurangan suplai listrik yang mengharuskan terjadinya pemadaman juga berperan meningkatkan inflasi karena mendorong pembengkakan biaya produksi (Bappenas, 2008).

Inflasi dapat timbul karena adanya tekanan dari sisi penawaran (*cost push inflation*), dari sisi permintaan (*demand pull inflation*), dan dari ekspektasi inflasi. Faktor-faktor pendorong terjadinya *cost push inflation* dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara partner dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (*administered price*, seperti BBM, TDL, tarif telepon, cukai rokok, dan tarif angkutan), dan terjadi *negative supply shocks*, seperti gagal panen dan langkanya komoditi tertentu akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Hal-hal tersebut otomatis akan membuat biaya produksi naik dan harga-harga melonjak tajam (Bank Indonesia, 2008).

Faktor penyebab terjadi *demand pull inflation* adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini digambarkan oleh *output* riil yang melebihi *output* potensialnya atau permintaan total (*aggregate demand*) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian. Dengan kata lain, banyaknya uang beredar di masyarakat yang melebihi jumlah produksi barang dan jasa merupakan pemicu inflasi jenis ini. Inflasi jenis ini bisa memicu naiknya produksi sehingga keuntungan perusahaan naik. Tapi, bila inflasi ini berkelanjutan, harga-harga barang lain dan harga biaya tenaga kerja juga akan ikut naik. Akibatnya, daya beli masyarakat akan turun (Bank Indonesia, 2009).

Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi apakah lebih cenderung bersifat adaptif atau *forward looking*. Hal ini tercermin dari perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan (lebaran, natal, dan tahun baru) dan penentuan upah minimum regional (UMR) (Bank Indonesia, 2009).

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan pada pembahasan di atas, terlihat bahwa Indonesia sedang mengalami perkembangan investasi yang cukup baik dari tahun ke tahun setelah terjadinya krisis ekonomi global Amerika Serikat (AS) pada tahun 2008. Setelah terjadinya krisis ekonomi global Amerika Serikat (AS) bagaimana pengaruh dari penanaman modal asing langsung, besarnya nilai ekspor serta inflasi di Indonesia apakah berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Namun, apabila Penanaman Modal Asing langsung, ekspor serta inflasi tidak memberikan dampak atau malah memberikan dampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja, maka diperlukan suatu kebijakan dengan menggunakan ukuran lain guna menstimulus terciptanya penyerapan kerja. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Dengan Perspektif Makro Ekonomi”

1.2 Rumusan Masalah

Penanaman Modal Asing langsung memiliki pengaruh yang luas terhadap perekonomian suatu negara terutama untuk negara berkembang yang membutuhkan modal untuk pembangunan. Salah satu manfaat positif dari PMA langsung adalah dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru pada negara penerima modal, apabila mengingat Indonesia mengalami ketimpangan antara jumlah pencari kerja dengan penyerapan tenaga kerja, sehingga menyebabkan angka pengangguran yang cukup tinggi. Dari rumusan masalah di atas, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh penanaman modal asing terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh ekspor terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini dimaksudkan untuk melihat perkembangan penanaman modal asing dari negara Asia pada sektor ekonomi di Indonesia, dan

kemudahan melakukan bisnis di Indonesia terhadap besarnya penyerapan tenaga kerja sehingga dapat diketahui dinamika penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

1. Untuk mengetahui pengaruh penanaman modal asing terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh ekspor terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh antara inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

1.4 Manfaat

Dengan dilaksanakan penelitian ini, maka dapat memberikan manfaat antara lain adalah:

1. Untuk Akademisi:
 - a. Memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan berkaitan dengan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia.
 - b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan variabel-variabel lain yang berkaitan dengan ketenagakerjaan di Indonesia.
2. Untuk Praktisi:
 - a. Memberikan informasi kepada Pemerintah Indonesia mengenai kondisi penyerapan tenaga kerja di Indonesia, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan untuk masalah ketenagakerjaan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Bab 2 memaparkan secara rinci mengenai tinjauan pustaka yang digunakan sebagai dasar pijakan atau fondasi untuk memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berpikir, penelitian sebelumnya untuk menghindari terjadinya duplikasi penelitian, dan menentukan hipotesis penelitian, yang akan dijelaskan secara rinci di bawah ini. Teori dan konsep pemikiran ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini akan dibahas dalam Subbab 2.1 diantaranya yaitu teori tenaga kerja terkait sumber daya manusia sebagai faktor utama produksi, teori pertumbuhan ekonomi, teori penyerapan tenaga kerja, teori ekspor, dan teori investasi.

Subbab selanjutnya yakni 2.2 akan memaparkan ringkasan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Kemudian pada Subbab 2.3 akan membahas mengenai kerangka pemikiran atau alur pemikiran dari penelitian ini. Sedangkan pada Subbab 2.4 akan membahas mengenai hipotesis atau dugaan sementara dari peneliti atas penelitian ini.

2.1.1 Tenaga Kerja

1. Teori Klasik

Adam Smith (1729-1790) merupakan tokoh utama dari aliran ekonomi yang kemudian dikenal sebagai aliran klasik. Dalam hal ini teori klasik Adam Smith juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh. Dengan kata lain, alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu (*necessary condition*) bagi pertumbuhan ekonomi.

Sesudah Adam Smith, Thomas Robert Malthus (1766-1834) dianggap sebagai pemikir klasik yang sangat berjasa dalam pengembangan pemikiran-pemikiran ekonomi. Thomas Robert Malthus mengungkapkan bahwa manusia

berkembang jauh lebih cepat dibandingkan dengan produksi hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia berkembang sesuai dengan deret ukur, sedangkan produksi makanan hanya meningkat sesuai dengan deret hitung. Malthus juga berpendapat bahwa jumlah penduduk yang tinggi pasti mengakibatkan turunnya produksi per kepala dan satu-satunya cara untuk menghindari hal tersebut adalah melakukan kontrol atau pengawasan pertumbuhan penduduk. Beberapa jalan keluar yang ditawarkan oleh Malthus adalah dengan menunda usia perkawinan dan mengurangi jumlah anak. Jika hal ini tidak dilakukan maka pengurangan penduduk akan diselesaikan secara alamiah antara lain akan timbul perang, epidemi, kekurangan pangan dan sebagainya.

John Maynard Keynes (1883-1946) berpendapat bahwa dalam kenyataan pasar tenaga kerja tidak bekerja sesuai dengan pandangan klasik. Di mana pun para pekerja mempunyai semacam serikat kerja (*labor union*) yang akan berusaha memperjuangkan kepentingan buruh dari penurunan tingkat upah. Walaupun tingkat upah diturunkan tetapi kemungkinan ini dinilai Keynes kecil sekali, tingkat pendapatan masyarakat tentu akan turun. Turunnya pendapatan sebagian anggota masyarakat akan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, yang pada gilirannya akan menyebabkan konsumsi secara keseluruhan berkurang. Berkurangnya daya beli masyarakat akan mendorong turunnya harga-harga.

Kalau harga-harga turun, maka kurva nilai produktivitas *marginal labor* (*marginal value of productivity of labor*) yang dijadikan sebagai patokan oleh pengusaha dalam memperkerjakan tenaga kerja akan turun. Jika penurunan harga tidak begitu besar maka kurva nilai produktivitas hanya turun sedikit. Meskipun demikian jumlah tenaga kerja yang bertambah tetap saja lebih kecil dari jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Lebih parah lagi kalau harga-harga turun drastis, ini menyebabkan kurva nilai produktivitas marginal tenaga kerja turun drastis pula, dan jumlah tenaga kerja yang tertampung menjadi semakin kecil dan pengangguran menjadi semakin luas.

Menurut mazhab klasik dalam Mulyadi (2003:191) tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi dalam perekonomian, selain tanah, modal, dan kewirausahaan. Seseorang akan mulai bekerja bila *utility* yang diterima lebih besar

daripada *disulity* tersebut menimbulkan penawaran tenaga kerja. Sementara itu, bagi pengusaha, nilai tambah *output* barang dan jasa haruslah minimal sama dengan upah yang dibayarkan bagi tenaga kerja. Dengan demikian lahirlah permintaan tenaga kerja. Kondisi saat penawaran dan permintaan bertemu disebut kondisi keseimbangan. Menurut mazhab ini, semua tenaga kerja akan terserap dalam perekonomian, atau akan selalu terjadi *full employment*. Dalam kondisi tersebut, menurut Jean Baptist Say, semua barang dan jasa yang diproduksi akan habis dibeli oleh masyarakat (*supply creates its own demand*).

Menurut Simanjuntak (1985:3) bahwa seberapa besar jumlah orang yang bersedia menawarkan jasanya guna membantu terselesaikan suatu proses produksi, tergantung kepada besarnya penyediaan atau *supply* tenaga kerja di dalam masyarakat. Jumlah orang yang bersedia untuk menjadi tenaga kerja terdiri dari golongan yang telah bekerja dan golongan yang siap untuk bekerja dan golongan yang sedang berusaha untuk mencari pekerjaan. Untuk itu keadaan ini dinamakan angkatan kerja atau *Labour Force*, sedangkan untuk konsep angkatan kerja secara menyeluruh dinamakan *Total Labour Force*. Konsep *Total Labour Force* ini digunakan untuk merumuskan jumlah keseluruhan angkatan kerja dari semua individu yang tidak dilembagakan dan yang berusia 16 tahun.

Sedangkan proses dimana terjadinya penempatan atau hubungan kerja melalui penyediaan dan permintaan tenaga kerja disebut pasar kerja. Seseorang yang telah masuk dalam pasar kerja adalah mereka yang tersedia untuk menawarkan jasanya kelancaran proses produksi.

2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pengertian Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator penting dalam menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi mengandung makna yang berbeda. Pembangunan ekonomi pada umumnya di definisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang disertai oleh sistem kelembagaan. Adapun pertumbuhan ekonomi

diartikan sebagai kenaikan GDP atau GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad,1999).

a. Teori Pertumbuhan Ekonomi Harrod-Domar

Teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar merupakan perekonomian pada dasarnya harus mencadangkan atau menabung sebagian tertentu dari pendapatan nasionalnya untuk menambah atau menggantikan barang-barang modal (gedung, alat- alat dan bahkan baku) yang telah rusak. Namun untuk mengacu pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan investasi baru yang merupakan tambahan neto terhadap cadangan atau stok modal, (*capital stok*). Bila diasumsikan bahwa ada hubungan ekonomi langsung antara besar total stok modal (K), dengan GDP total (Y).

Dalam ilmu ekonomi dikenal sebagai rasio modal output (*capital output ratio*) adalah 3 banding 1. Apabila ditetapkan rasio modal output sebagai K, dan selanjutnya kita anggap bahwa rasio tabungan nasional (*national saving ratio*) sebagai s, merupakan persentase atau bagian tetap dari output nasional yang selalu ditabung dan bahwa jumlah investasi (penanaman modal) baru ditentukan oleh jumlah tabungan total (S) maka dapat menyusun sebuah model pertumbuhan ekonomi yang sederhana.

Harrod dan Domar memberikan peran penting pembentukan investasi terhadap proses pertumbuhan ekonomi suatu negara. Investasi dianggap faktor penting karena memiliki dua peran sekaligus dalam mempengaruhi perekonomian. Pertama, investasi berperan sebagai faktor yang dapat menciptakan pendapatan, artinya investasi mempengaruhi sisi permintaan. Kedua, investasi dapat memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan meningkatkan stok modal, artinya investasi akan mempengaruhi sisi penawaran. Dalam perspektif waktu yang lebih panjang pengeluaran investasi tidak hanya mampu mempengaruhi permintaan agregatif, tetapi juga mampu mempengaruhi penawaran agregatif melalui perubahan kapasitas produksi.

2.1.3 Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah tertentu dari tenaga kerja yang

digunakan dalam suatu unit usaha tertentu atau dengan kata lain penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam suatu unit usaha. Menurut Dinas Tenaga Kerja (2010) bahwa penyerapan tenaga kerja merupakan banyaknya orang yang dapat terserap untuk bekerja pada suatu perusahaan atau suatu instansi. Penyerapan tenaga kerja ini akan menampung semua tenaga kerja yang tersedia apabila lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang tersedia (Disnaker, 2010).

Kebijaksanaan negara dalam penyerapan tenaga kerja meliputi upaya-upaya untuk mendorong pertumbuhan dan perluasan lapangan kerja di setiap daerah serta, perkembangan jumlah dan kualitas angkatan kerja yang tersedia agar dapat memanfaatkan seluruh potensi pembangunan di daerah masing-masing. Bertitik tolak dari kebijaksanaan tersebut maka dalam rangka mengatasi masalah perluasan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran, Departemen Tenaga Kerja dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memandang perlu untuk menyusun program yang mampu baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mendorong penciptaan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.

Penyerapan tenaga kerja sering dikaitkan dengan teori permintaan. Dalam teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dengan harga. Sehubungan dengan tenaga kerja, permintaan tenaga kerja berarti hubungan antara tingkat upah dengan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki oleh majikan (pengusaha) untuk diperkerjakan (dibeli). Menurut Sumarsono (2003) bahwa permintaan pengusaha atas tenaga kerja berlainan dengan permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Konsumen membeli barang karena barang itu memberikan nikmat (*utility*) kepada pembeli tersebut. Akan tetapi pengusaha memperkerjakan seseorang itu membantu memproduksi barang atau jasa untuk dijual kepada masyarakat konsumen. Dengan kata lain, permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja, tergantung dari pertambahan permintaan masyarakat terhadap barang yang diproduksinya. Permintaan tenaga kerja yang seperti itu disebut *derived demand*.

Dari pernyataan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mempertahankan tenaga kerja yang digunakan perusahaan atau industri, maka

permintaan masyarakat terhadap produk perusahaan harus tetap stabil, dan jika memungkinkan meningkat. Sumarsono (2003) mengatakan bahwa untuk menjaga stabilitas permintaan produk perusahaan serta kemungkinan pelaksanaan ekspor, maka perusahaan atau industri harus memiliki kemampuan bersaing baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri. Dengan demikian bisa diharapkan permintaan perusahaan terhadap tenaga kerja bisa dipertahankan atau bahkan ditingkatkan.

Hukum permintaan tenaga kerja pada hakikatnya adalah semakin rendah upah dari tenaga kerja maka semakin banyak permintaan dari tenaga kerja tersebut. Apabila upah yang diminta besar, maka perusahaan akan mencari tenaga kerja lain yang upahnya lebih rendah dari yang pertama. Hal ini karena dipengaruhi oleh banyak faktor, yang di antaranya adalah besarnya jumlah penduduk, harga dari tenaga kerja (upah) dan skill yang dimiliki oleh tenaga kerja tersebut. Selain itu, faktor-faktor eksternal seperti terjadinya krisis moneter juga sangat mempengaruhi struktur penyerapan tenaga kerja dalam suatu perekonomian (Galbraith dan Galbraith, 2007).

Menurut Fudjaja (2003), jumlah perusahaan industri menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat ketika setiap terjadi peningkatan jumlah perusahaan yang bergerak di bidang industri akan menyebabkan terjadinya peningkatan penyerapan tenaga kerja untuk sektor industri itu sendiri.

Permintaan industri terhadap tenaga kerja merupakan permintaan turunan (*derived demand*). Hal ini disebabkan karena tenaga kerja merupakan salah satu *input* faktor produksi, maka fungsi permintaan industri terhadap tenaga kerja dan kapital dapat diturunkan dari fungsi produksi kendala ongkos atau fungsi ongkos kendala produksi. Cara pertama biasa dilakukan apabila *input* faktor produksi yang diperlukan oleh industri tersedia dengan lengkap. Sementara cara kedua bisa dilakukan bila *input* faktor produksi terbatas jumlahnya (Bachtar dan Elfindri, 2008).

Pengusaha memperkerjakan seseorang karena membantu memproduksi barang dan jasa untuk dijual ke konsumen. Oleh karena itu kenaikan permintaan

pengusaha terhadap tenaga kerja tergantung dari kenaikan permintaan masyarakat akan barang yang diproduksi. Dalam proses produksi, tenaga kerja memperoleh pendapatan sebagai balas jasa dari upah yang telah dilakukannya, yaitu berwujud upah.

Maka pengertian permintaan tenaga kerja dapat diartikan sebagai jumlah tenaga kerja yang diminta oleh pengusaha pada berbagai tingkat upah. Menurut Ananta (1993) bahwa permintaan tenaga kerja merupakan sebuah daftar berbagai alternatif kombinasi tenaga kerja dengan *input* lainnya yang tersedia yang berhubungan dengan tingkat gaji. Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah tertentu dari tenaga kerja yang digunakan dalam suatu unit usaha tertentu atau dengan kata lain penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam suatu unit usaha.

2.1.4 Teori Investasi

a. Pengertian Investasi

Teori ekonomi mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran pemerintah untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa yang akan datang.

Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang (Sunariyah, 2003). Menurut Samuelson, investasi meliputi penambahan stok modal atau barang di suatu negara, seperti bangunan peralatan produksi, dan barang-barang inventaris dalam waktu satu tahun. Investasi merupakan langkah mengorbankan konsumsi di waktu mendatang. (Samuelson, 2014)

Investasi merupakan salah satu komponen yang penting dalam GNP. Investasi memiliki peran penting dalam permintaan agregat. Pertama bahwa pengeluaran investasi lebih tidak stabil apabila dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi sehingga fluktuasi investasi dapat menyebabkan resesi. Kedua, bahwa

investasi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi serta perbaikan dalam produktivitas tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada tenaga kerja dan jumlah stok kapital (Setyowati dan Fatimah, 2007).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya investasi atau penanaman modal merupakan pengeluaran atau pembelanjaan yang dapat berupa jenis barang modal, bangunan, peralatan modal, dan barang-barang inventaris yang digunakan untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa atau untuk meningkatkan produktivitas kerja sehingga terjadi peningkatan *output* yang dihasilkan dan tersedia untuk masyarakat.

b. Teori Investasi

Dalam jangka panjang pertumbuhan investasi berpengaruh pada bertambahnya stok kapital dan selanjutnya menaikkan produktivitas. Di negara yang tingkat penganggurannya tinggi, seperti Indonesia sekarang, angkatan kerja yang menganggur dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembentukan modal.

a) Teori Neo Klasik

Menekankan pentingnya tabungan sebagai sumber investasi. Investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Makin cepat perkembangan investasi ketimbang laju pertumbuhan penduduk, makin cepat perkembangan volume stok kapital rata-rata per tenaga kerja. Makin tinggi rasio kapital per tenaga kerja cenderung makin tinggi kapasitas produksi per tenaga kerja. Tokoh Neo Klasik, Sollow dan Swan memusatkan perhatiannya pada bagaimana pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi dan *output* saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 2010: 88-89).

c. Jenis Investasi

Berdasarkan jenisnya investasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu: Pertama investasi pemerintah, adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada umumnya investasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; Kedua investasi swasta, adalah investasi yang dilakukan oleh sektor swasta nasional yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun investasi yang dilakukan oleh

swasta asing atau disebut Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi yang dilakukan swasta bertujuan untuk mencari keuntungan dan memperoleh pendapatan serta didorong oleh adanya pertambahan pendapatan. Jika pendapatan bertambah konsumsi pun bertambah dan bertambah pula *effective demand*. Investasi timbul diakibatkan oleh bertambahnya permintaan yang sumbernya terletak pada penambahan pendapatan disebut *induced investment*.

Dana investasi swasta menurut asalnya terdiri dari dua 2 macam, yaitu: PMA, jenis investasi yang sumber modalnya berasal dari luar negeri, sedangkan PMDN ialah jenis investasi yang sumber modalnya berasal dari dalam negeri.

PMA adalah salah satu upaya untuk meningkatkan jumlah modal untuk pembangunan ekonomi yang bersumber dari luar negeri. Salvatore (1997) menjelaskan bahwa PMA terdiri atas:

1. Investasi portofolio (*portfolio investment*), yakni investasi yang melibatkan hanya aset-aset finansial saja, seperti obligasi dan saham, yang didenominasikan atau ternilai dalam mata uang nasional. Kegiatan-kegiatan investasi portofolio atau finansial ini biasanya berlangsung melalui lembaga-lembaga keuangan seperti bank, perusahaan dana investasi, yayasan pensiun, dan sebagainya.
2. Investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*), merupakan PMA yang meliputi investasi ke dalam aset-aset secara nyata berupa pembangunan pabrik-pabrik, pengadaan berbagai macam barang modal, pembelian tanah untuk keperluan produksi, dan sebagainya. Wiranata (2004) berpendapat bahwa investasi asing secara langsung dapat dianggap sebagai salah satu sumber modal pembangunan ekonomi yang penting. Semua negara yang menganut sistem ekonomi terbuka, pada umumnya memerlukan investasi asing, terutama perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan ekspor. Di negara maju seperti Amerika, modal asing (khususnya dari Jepang dan Eropa Barat) tetap dibutuhkan guna memacu pertumbuhan ekonomi domestik, menghindari kelesuan pasar dan penciptaan kesempatan kerja. Apalagi di negara berkembang seperti Indonesia, modal asing sangat diperlukan terutama sebagai akibat dari

modal dalam negeri yang tidak mencukupi. Untuk itu berbagai kebijakan di bidang penanaman modal perlu diciptakan dalam upaya menarik pihak luar negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Dalam upaya untuk menarik minat investor asing menanamkan modalnya di Indonesia, pemerintah terus meningkatkan kegiatan promosi, baik melalui pengiriman utusan ke luar negeri maupun peningkatan kerja sama antara pihak swasta nasional dengan swasta asing. Sementara itu, BKPM sebagai badan yang bertanggung jawab dalam kegiatan penanaman modal terus mengembangkan perannya dalam menumbuhkan investasi.

Masuknya PMA di Indonesia diatur oleh pemerintah dalam UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan dilengkapi serta disempurnakan oleh UU Nomor 11 Tahun 1970 juga tentang penanaman modal asing. UU itu didukung oleh berbagai kemudahan yang dilengkapi dengan berbagai kebijakan dalam paket-paket deregulasi. Hal ini dimaksudkan untuk lebih menarik investasi di dalam memenuhi kebutuhan sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Sementara itu, rencana PMA yang disetujui pemerintah adalah nilai investasi proyek baru, perluasan, dan alih status, yang terdiri atas saham peserta Indonesia.

Penggolongan investasi berdasarkan pembentukan modal terdiri dari 2 jenis investasi yaitu: investasi bruto, adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah yang belum dikurangi depresiasi. Investasi neto adalah investasi bruto dikurangi depresiasi (jumlah perkiraan sejauh mana barang modal telah digunakan dalam periode yang bersangkutan). Investasi berdasarkan timbulnya: (1) investasi otonomi berarti pembentukan modal yang tidak dipengaruhi pendapatan nasional; (2) investasi terpengaruh (*induced investment*) investasi yang dipengaruhi oleh pendapatan nasional.

Menurut Sukirno (2003:5) investasi secara luas bahwa dalam perhitungan pendapatan nasional, pengertian investasi meliputi: (1) seluruh nilai pembelian para pengusaha atas barang-barang dan modal dalam pembelanjaan untuk mendirikan industri-industri; (2) pengeluaran masyarakat untuk mendirikan rumah tempat tinggal dan (3) pertumbuhan dalam nilai stok barang perusahaan berupa bahan mentah, barang yang belum selesai diproses dan barang jadi.

2.1.5 Teori Penanaman Modal Asing

Hal yang penting dalam perkembangan penanaman modal asing adalah perkembangan dari banyaknya teori-teori yang mencoba menjelaskan mengapa perusahaan penanaman modal menjadi isu utama dalam penanaman modal asing, mengapa perusahaan multinasional atau penanaman modal memilih satu dari beberapa negara yang dijadikan lokasi bagi aktivitas bisnis dan penanaman modal dan mengapa mereka menggunakan satu model khusus untuk masuk ke suatu negara penerima modal.

Teori-teori ini juga menjelaskan mengapa beberapa negara lebih berhasil dibandingkan negara lain dalam menarik penanaman modal asing masuk ke negaranya. Teori-teori ini telah berperan penting dalam pembentukan rezim hukum penanaman modal asing baik secara nasional maupun internasional.

Sornarajah (2010) mengembangkan *The Middle Path Theory* atau teori jalan tengah. Teori ini berupaya mendamaikan adanya poliniasi dua teori yang saling bersilang, yaitu teori klasik yang berpendapat bahwa semua penanaman modal asing baik sifatnya dan teori yang kedua yaitu teori ketergantungan yang beranggapan bahwa semua penanaman modal asing bersifat membahayakan.

Zaidun dalam orasi ilmiahnya, mengemukakan teori-teori yang berkaitan dengan kepentingan negara dalam bidang investasi, tinjauannya adalah dari sudut pandang kepentingan pembangunan ekonomi, yaitu melihat segi kepentingan ekonomi yang menjadi dasar pertimbangan perumusan kebijakan, lazimnya meminjam teori-teori ekonomi pembangunan sebagai dasar pijakan kebijakan hukum investasi yang cukup populer (Ardiansyah, 2014), antara lain:

1. Teori Klasik dan Neo Klasik (*The Classical and Neo Classical Theory on Foreign Investment*)

Teori ekonomi klasik dalam penanaman modal asing menyatakan bahwa penanaman modal asing secara keseluruhan menguntungkan ekonomi negara penerima modal. Terdapat beberapa faktor yang mendukung pandangan teori klasik dan neo klasik, yaitu:

Pertama, merupakan fakta bahwa modal asing yang dibawa ke negara pemilik modal menjamin bahwa modal nasional/domestic yang tersedia dapat digunakan

untuk kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Masuknya modal dan penanaman modal asing kembali oleh penanaman modal asing yang berasal dari keuntungan yang tidak dikembalikan ke negaranya, akan meningkatkan tabungan dari negara penerima modal. Penghasilan pemerintah melalui pajak meningkat dan pembayaran-pembayaran lain juga akan meningkat. Lebih jauh lagi, modal asing yang masuk ke negara penerima modal mengurangi pembatasan neraca pembayaran dari negara penerima modal. Secara umum, penanaman modal meningkatkan aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sornarajah, 2010).

Kedua, Penanaman modal asing biasanya membawa serta teknologi yang terdapat di negara pemilik modal dan menyebarkan teknologi tersebut di dalam negara penerima modal.

Ketiga, dengan masuknya modal asing berarti terciptanya lapangan kerja baru. Tanpa penanaman modal asing kesempatan untuk bekerja tidak akan didapat.

Keempat, pekerja-pekerja yang dipekerjakan pada perusahaan penanaman modal asing akan mendapatkan keahlian sehubungan dengan teknologi yang dibawa dan diperkenalkan oleh penanam modal asing. Keahlian dalam bidang manajemen dari proyek-proyek besar akan beralih kepada tenaga ahli lokal.

Kelima, fasilitas-fasilitas infrastruktur akan dibangun baik oleh pemerintah maupun perusahaan penanaman modal asing dan semua fasilitas seperti transportasi, kesehatan, pendidikan yang diperuntukkan bagi penanaman modal asing akan juga bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Pendapat yang sangat mendasar dari teori neo-klasik adalah bahwa penanaman modal asing khususnya negara berkembang, memainkan peran sebagai tutor. Penanaman modal asing menggantikan fungsi produksi yang lebih rendah di negara industri yang masuk melalui alih teknologi, keahlian manajemen dan pemasaran, informasi pasar, pengalaman organisasi, penemuan- penemuan produk baru dan teknik produksi, serta pelatihan-pelatihan pekerja, khususnya perusahaan multinasional yang dianggap sebagai agen yang berguna bagi pengalihan teknologi dan ilmu pengetahuan (Chandrawulan, 2011).

Pendukung dari teori neo-klasik ini lebih jauh lagi berpendapat bahwa penanaman modal asing meningkatkan persaingan di bidang industri dengan pengembangan produktivitas. Penanaman modal asing juga memperluas pasar bagi produsen negara penerima modal untuk memasarkan barang-barangnya ke pasaran dunia, membawa pada persaingan yang lebih besar dan kesempatan untuk pengalihan teknologi (Chandrawulan, 2011).

Teori neo-klasik telah memainkan peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi prinsip dasar dari hukum internasional dalam bidang penanaman modal asing. Kebanyakan perjanjian bilateral di bidang penanaman modal di antara negara-negara percaya bahwa masuknya penanaman modal asing akan mendorong pembangunan ekonomi dan membawa kemakmuran ekonomi negara mereka (Chandrawulan, 2011).

2. Teori Kebergantungan (*The Dependency Theory*)

Teori ini didasari oleh banyaknya penanaman modal asing yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional yang berkantor pusat di negara maju dan beroperasi melalui anak-anak perusahaannya di negara berkembang. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan multinasional dalam menanamkan modalnya di negara berkembang dengan kebijakan global hanyalah untuk kepentingan induk perusahaan dan pemilik saham dari perusahaan multinasional tersebut yang berada di negara penanam modal. Negara pemilik modal menjadi sentral ekonomi di dunia, sedangkan negara-negara berkembang melayani kepentingan dari negara pemilik modal. Pembangunan menjadi tidak mungkin dalam suatu negara berkembang sebagai pelaku ekonomi yang tidak penting kecuali dapat mengubah situasi dengan negara berkembang menjadi pusat ekonomi melalui penanaman modal asing (Sornarajah, 2010)

Menurut teori kebergantungan, penanaman modal asing di negara berkembang tidak menghasilkan pembangunan ekonomi yang berarti. Penanaman modal asing menahan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pemasukan di negara penerima modal (Sornarajah, 2010). Perkembangan ekonomi negara berkembang dirasakan lamban karena berbagai alasan.

Pertama, penanaman modal asing langsung yang banyak dilakukan oleh perusahaan multinasional biasanya menegakkan kebijakan global bagi kepentingan negara-negara maju yang kantor pusat dan pemilik sahamnya berada di negara pemilik modal. Negara pemilik modal dari penanaman modal asing menjadi pusat ekonomi negara penerima modal hanya sebagai pelayan ekonomi yang tidak penting bagi pusat ekonomi.

Kedua, masuknya atau mengalirnya modal ke negara berkembang, terdapat ketentuan bahwa modal yang ditanam dan keuntungan yang diperoleh di negara penerima modal asing dapat dikembalikan ke negaranya. Berdasarkan ketentuan ini, dalam praktik penanaman modal asing mengembalikan baik modal asal maupun keuntungan dua kali lipat dari modal yang mereka bawa.

Ketiga, penanaman modal asing menggunakan kekayaan alam tanpa memerhatikan kepentingan dan kebutuhan setempat, sebagai akibatnya mereka kehilangan pekerjaan dan mengalami kebangkrutan.

Penanaman modal asing berdasarkan teori kebergantungan hanya menguntungkan perusahaan multinasional dan membuat kebergantungan negara berkembang dalam membangun ekonominya bergantung kepada penanaman modal asing dan tidak bermanfaat bagi negara penerima modal. Pada kenyataannya, di dunia saat ini dengan dikurangnya bantuan dana resmi terhadap negara-negara berkembang, penanaman modal menjadi sumber pendanaan yang penting bagi pembangunan proyek-proyek besar. Lebih jauh lagi, keberadaan teori kebergantungan dalam penanaman modal asing langsung tetap dipertahankan di era globalisasi (Chandrawulan, 2011).

3. Teori Penengah (*The Middle Path Theory*)

Teori ini muncul sebagai reaksi dari negara-negara berkembang dalam mengubah pandangannya terhadap perusahaan multinasional. Negara-negara berkembang mulai percaya diri dalam menghadapi perusahaan multinasional dan perusahaan multinasional pun meninggalkan perannya sebagai alat dari kebijakan luar negeri negara pemilik modal.

Teori penengah dikenal juga sebagai teori yang mengedepankan peran pemerintah atau negara dalam melakukan strategi pembangunan ekonomi

khususnya di negara-negara berkembang. Menurut teori ini, negara-negara harus merumuskan dan menyusun serta mengikuti tujuan-tujuan yang tidak mudah dilakukannya sebagai permintaan atau kepentingan dari kelompok- kelompok sosial, kelas-kelas atau masyarakat dalam wilayahnya (Chandrawulan, 2011).

2.1.6 Teori Perdagangan Luar Negeri (Ekspor)

Ahli-ahli ekonomi klasik menganalisis lebih mendalam lagi peranan perdagangan luar negeri dalam perekonomian. Teori keunggulan absolut (*absolut advantages*) dibangun oleh Adam Smith sebagai perbaikan atas merkantilisme. Menurut Adam Smith, bahwa perdagangan akan meningkatkan kemakmuran bila dilaksanakan melalui mekanisme perdagangan bebas. Melalui perdagangan bebas, para pelaku ekonomi diarahkan untuk melakukan spesialisasi dalam upaya peningkatan efisiensi (Rahardja dan Manurung, 2006). Setiap negara akan memperoleh manfaat perdagangan internasional karena melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak, serta mengimpor barang jika negara tersebut memiliki ketidakunggulan mutlak (Hamdy, 2001). Jika sebuah negara lebih efisien daripada (atau memiliki keunggulan absolut terhadap) negara lain dalam memproduksi sebuah komoditi, namun kurang efisien dibanding (atau memiliki kerugian absolut terhadap) negara lain dalam memproduksi komoditi lainnya, maka kedua negara tersebut dapat memperoleh keuntungan dengan cara masing-masing melakukan spesialisasi dalam memproduksi komoditi yang memiliki keunggulan absolut, dan menukarkannya dengan komoditi lain yang memiliki kerugian absolut (Salvatore, 1996).

Lebih lanjut teori perdagangan internasional dikemukakan oleh David Ricardo dengan prinsip-prinsip perdagangan internasional yang dikenal dengan nama *The Theory of Comparative Advantage* atau *The Theory of Relative Cost* yaitu mencoba melihat keuntungan/kerugian dalam perbandingan relatif. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara akan menghasilkan dan kemudian mengekspor suatu barang yang memiliki *comparative advantage* terbesar dan mengimpor barang yang memiliki *comparative disadvantage*, yaitu suatu barang yang dapat

dihasilkan dengan lebih murah dan mengimpor barang yang kalau dihasilkan sendiri memakan ongkos yang besar. Teori ini pada dasarnya menyatakan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh banyaknya tenaga kerja yang dicurahkan untuk memproduksi barang tersebut. Makin banyak tenaga kerja yang dicurahkan untuk memproduksi suatu barang, makin mahal barang tersebut.

Suatu negara akan memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dalam memproduksi suatu barang kalau biaya pengorbanannya dalam memproduksi barang tersebut (dalam satuan barang lain) lebih rendah daripada negara-negara lainnya. Perdagangan antara dua negara akan menguntungkan kedua belah pihak jika masing-masing negara memproduksi dan mengekspor produk yang keunggulan komparatifnya ia kuasai (Krugman dan Obsfield, 2000) diterjemahkan (Basri, 2004).

Adam Smith dengan teori keunggulan mutlak (*Absolut Advantage*) mengemukakan ide-ide sebagai berikut:

- a. Adanya *Division of Labour* (Pembagian Kerja Internasional) dalam menghasilkan sejenis barang. Dengan adanya pembagian kerja, suatu negara dapat memproduksi barang dengan biaya yang lebih murah dibanding negara lain, sehingga dalam mengadakan perdagangan negara tersebut memperoleh keunggulan mutlak.
- b. Spesialisasi Internasional dan Efisiensi Produksi. Dengan spesialisasi, suatu negara akan mengkhususkan pada produksi barang yang memiliki keuntungan. Suatu negara akan mengimpor barang-barang yang bila diproduksi barang yang memiliki keuntungan. Suatu negara akan mengimpor barang-barang yang bila diproduksi sendiri (dalam negeri) tidak efisien atau kurang menguntungkan, sehingga keunggulan mutlak diperoleh bila suatu negara mengadakan spesialisasi dalam memproduksi barang. Keunggulan mutlak diartikan sebagai keuntungan yang dinyatakan dengan banyaknya jam/hari kerja yang dibutuhkan untuk membuat barang-barang produksi. Suatu negara akan mengekspor barang tertentu karena dapat menghasilkan barang tersebut dengan biaya yang secara mutlak lebih murah daripada negara lain. Dengan kata lain, negara tersebut memiliki keuntungan mutlak

dalam produksi barang. Jadi, keuntungan mutlak terjadi bila suatu negara lebih unggul terhadap satu macam produk yang dihasilkan, dengan biaya produksi yang lebih murah jika dibandingkan dengan biaya produksi di negara lain.

Ekspor adalah upaya melakukan penjualan komoditi yang kita miliki kepada bangsa lain atau negara lain, dengan mengharapkan pembayaran dalam valuta asing, serta melakukan komunikasi dengan memakai bahasa asing. Sebaliknya, kegiatan impor adalah melakukan pembelian komoditi yang lebih berdaya guna dari negara lain yang bersedia membayar harganya dalam valuta asing (Amir, 2004).

Tujuan dilakukannya perdagangan internasional salah satunya adalah untuk mengatasi hambatan ekonomi yang banyak terjadi pada negara-negara di dunia. Terutama dalam upaya meningkatkan pendapatan dan memperluas kesempatan kerja. Untuk negara yang sedang berkembang, perdagangan internasional sangatlah membantu dalam mengatasi masalah kemiskinan dan menurunkan angka ketergantungan, khususnya ketergantungan akan sumber dana bagi pembangunan, dengan cara dihasilkannya devisa bagi negara tersebut (Djojohadikusumo dalam Boediono, 2005).

Ekspor suatu negara merupakan impor bagi negara lain dengan hanya dianggap tetap, ekspor tergantung dari pendapatan luar negeri bukan pendapatan nasional negara tersebut, yang artinya ekspor tidak tergantung pendapatan nasional (Arsyad, 1999).

2.1.7 Teori Inflasi

Definisi dari inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga yang meningkat secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada sebagian besar dari harga barang-barang lain. Definisi lain mengatakan bahwa inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam perekonomian. Kenaikan tersebut biasanya berlaku keatas kebanyakan barang, tetapi tingkat kenaikannya berbeda. Menurut Teori Keynes inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonominya. Proses inflasi, menurut pandangan ini, tidak

lain adalah proses perebutan bagian rezeki diantara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang bisa disediakan oleh masyarakat tersebut. Proses perebutan ini akhirnya diterjemahkan menjadi keadaan dimana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (*inflationary gap*).

Menurut Irving Fisher dalam buku Sukirno (2002), kenaikan harga-harga umum atau inflasi (P) disebabkan oleh tiga faktor yaitu jumlah uang beredar (M), kecepatan peredaran uang (V), dan jumlah barang yang diperdagangkan (T). Menurutnya inflasi adalah proses kenaikan harga barang umum yang berlaku dalam perekonomian. Ini tidak berarti bahwa harga-harga berbagai macam barang itu naik dengan persentase yang sama. Yang penting terdapat kenaikan harga-harga umum barang secara terus-menerus selama satu periode tertentu. Kenaikan yang terjadi hanya satu sekali saja (meskipun dengan persentase yang cukup besar) bukanlah merupakan inflasi.

Veneris dan Sebol dalam Nanga (2001) mendefinisikan inflasi sebagai suatu kecenderungan meningkatnya tingkat harga umum secara terus-menerus sepanjang waktu. Berdasarkan definisi tersebut, kenaikan tingkat harga umum (*general price level*) yang terjadi sekali waktu saja, tidaklah dapat dikatakan sebagai inflasi. Dari definisi tersebut ada tiga hal penting yang ditekankan dari inflasi, yaitu:

1. Adanya kecenderungan harga-harga untuk meningkat, yang berarti bisa saja tingkat harga yang terjadi pada waktu tertentu turun atau naik dibandingkan dengan sebelumnya, tetapi tetap menunjukkan tendensi yang meningkat.
2. Bahwa kenaikan tingkat harga tersebut berlangsung secara terus-menerus (*sustained*), yang berarti bukan hanya terjadi pada satu waktu saja, akan tetapi bisa beberapa waktu lamanya.
3. Bahwa tingkat harga yang dimaksud disini adalah tingkat harga umum, yang berarti tingkat harga yang mengalami kenaikan itu bukan hanya pada satu atau beberapa komoditi saja, akan tetapi untuk harga barang secara umum.

Ada berbagai cara untuk menggolongkan macam inflasi, yang pertama didasarkan atas besar tidaknya inflasi tersebut (Boediono, 2005:162). Disini kita bedakan beberapa macam inflasi :

1. Inflasi ringan (di bawah 10% setahun)
 2. Inflasi sedang (antara 10-30% setahun)
 3. Inflasi berat (antara 30-100% setahun)
 4. Hiperinflasi (di atas 100% setahun)
- a. Dasar Teori Kurva Phillips

Tujuan utama dari kebijakan ekonomi makro adalah untuk memecahkan masalah inflasi sebagai penyebab terjadinya ketidakstabilan harga dan untuk memecahkan masalah pengangguran. Jadi kebijakan ekonomi makro harus dapat mencapai sasarannya, yaitu menciptakan stabilitas harga dan dalam waktu bersamaan menciptakan kesempatan kerja. Di pasar tenaga kerja, penurunan tingkat upah akan menyebabkan meningkatkan pengangguran karena adanya kelebihan penawaran tenaga kerja. Sebaliknya, tingkat upah akan naik jika terjadi kelebihan permintaan tenaga kerja atau jumlah pengangguran meningkat dan jumlah pencarian kerja bertambah, maka tingkat upah akan turun. Demikian pula tenaga kerja akan meningkat (Prasetyo, 2009).

Kurva Phillips menggambarkan ciri perhubungan diantara tingkat kenaikan upah dengan tingkat pengangguran, atau di antara tingkat harga dengan tingkat pengangguran. Nama kurva tersebut diambil dari orang yang mula-mula sekali membuat studi dalam aspek tersebut. Dalam tahun 1958 A.W. Phillips, yang pada waktu itu menjadi Profesor di London School of Economics, menerbitkan satu studi mengenai ciri-ciri perubahan tingkat upah di Inggris. Studi tersebut meneliti sifat hubungan diantara tingkat pengangguran dan kenaikan tingkat upah. Kesimpulan dari studi tersebut adalah : terdapat suatu sifat hubungan yang negatif (berbalikan) diantara kenaikan tingkat upah dengan tingkat pengangguran. Pada ketika tingkat pengangguran tinggi, persentase kenaikan tingkat upah adalah rendah dan apabila tingkat pengangguran rendah, persentase kenaikan tingkat upah adalah tinggi.

Pasar tenaga kerja didasarkan atas dua asumsi sebagai berikut :

- 1) Penawaran dan permintaan tenaga kerja akan menentukan tingkat upah.
- 2) Perubahan tingkat upah ditentukan oleh besarnya kelebihan permintaan tenaga kerja yang disebut *Excess Demand*.

2.2 Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

2.2.1 Penanaman Modal Asing dan Penyerapan Tenaga Kerja

Menurut teori Klasik bahwa investasi merupakan suatu pengeluaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan produksi. Jadi investasi merupakan pengeluaran yang akan menambah jumlah alat-alat produksi dalam masyarakat dimana pada akhirnya akan menambah pendapatan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. Dengan adanya kegiatan produksi yang meningkat, maka perusahaan membutuhkan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat meningkat, yang selanjutnya akan menciptakan atau meningkatkan permintaan di pasar. Pasar berkembang dan berarti juga volume kegiatan produksi, kesempatan kerja dan pendapatan dalam negeri ikut meningkat.

Investasi juga sebagai sarana dan motivasi dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi khususnya dalam upaya memperluas penggunaan tenaga kerja dalam meningkatkan produksi (*output*). Kaum Klasik menganggap akumulasi kapital sebagai suatu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi. Maka dengan adanya pembangunan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan. Jadi, secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa dengan melakukan penanaman modal maka dapat meningkatkan pendapatan sekaligus meningkatkan penyerapan tenaga kerja (Boediono, 1981).

Di dalam neraca nasional atau struktur Produk Domestik Bruto (PDB) menurut penggunaannya investasi didefinisikan sebagai pembentukan modal tetap domestik (*domestic fixed capital formation*). Investasi sebagai salah satu komponen penting dari permintaan agregat di dalam ekonomi merupakan faktor yang sangat krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi dalam negeri (*sustainable development*). Salah satu indikator keberhasilannya adalah tingkat pendapatan nasional per kapita atau laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) rata-rata per tahun yang tinggi dan stabil. Proses pembangunan ekonomi dalam negeri melibatkan kegiatan-kegiatan produksi (barang dan jasa) di semua sektor ekonomi domestik untuk keperluan kegiatan-kegiatan tersebut, perlu dibangun pabrik-pabrik, gedung perkantoran, mesin dan alat-alat produksi. Selain itu juga perlu

disiapkan tenaga kerja atau sumber daya manusia (*SDM/human capital*) yang terampil, untuk pengadaan semua itu, termasuk fasilitas seperti gedung sekolah, perpustakaan dan sebagainya buat mendukung penyiapan SDM, diperlukan dana yang disebut dana investasi (Tambunan dalam Setyowati dan Fatimah, 2007).

Berdasarkan pendapat dari para ahli tersebut di atas menunjukkan betapa pentingnya investasi bagi penyerapan tenaga kerja. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pengeluaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan produksi, misalnya dengan menambah jumlah alat-alat produksi dalam masyarakat dimana pada akhirnya akan menambah pendapatan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. Dengan adanya kegiatan produksi yang semakin meningkat, maka perusahaan membutuhkan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat meningkat, yang selanjutnya akan menciptakan atau meningkatkan permintaan di pasar. Pasar berkembang dan berarti juga volume kegiatan produksi, kesempatan kerja dan pendapatan di dalam negeri ikut meningkat. Dengan demikian besarnya nilai investasi akan menentukan besarnya penyerapan tenaga kerja. Secara teoritis, semakin besar nilai investasi pada Industri dimana investasi yang dilakukan bersifat padat karya, sehingga kesempatan kerja yang diciptakan semakin tinggi.

Pendapat yang sangat mendasar dari teori neo-klasik adalah bahwa penanaman modal asing khususnya negara berkembang, memainkan peran sebagai tutor. Penanaman modal asing menggantikan fungsi produksi yang lebih rendah di negara industri yang masuk melalui alih teknologi, keahlian manajemen dan pemasaran, informasi pasar, pengalaman organisasi, penemuan-penemuan produk baru dan teknik produksi, serta pelatihan-pelatihan pekerja, khususnya perusahaan multinasional yang dianggap sebagai agen yang berguna bagi pengalihan teknologi dan ilmu pengetahuan.

Pendukung dari teori neo-klasik ini lebih jauh lagi berpendapat bahwa penanaman modal asing meningkatkan persaingan di bidang industri dengan pengembangan produktivitas. Penanaman modal asing juga memperluas pasar bagi produsen negara penerima modal untuk memasarkan barang-barangnya ke pasaran

dunia, membawa pada persaingan yang lebih besar dan kesempatan untuk pengalihan teknologi.

Teori neo-klasik telah memainkan peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi prinsip dasar dari hukum internasional dalam bidang penanaman modal asing. Kebanyakan perjanjian bilateral di bidang penanaman modal di antara negara-negara percaya bahwa masuknya penanaman modal asing akan mendorong pembangunan ekonomi dan membawa kemakmuran ekonomi negara mereka.

Berdasarkan teori, didukung penelitian terdahulu yang dilakukan Appleyard *et al* (2008) yang menyatakan bahwa terdapat potensi keuntungan adanya penanaman modal asing (*Foreign Direct Investment*) yaitu di antaranya adalah dengan adanya aliran penanaman modal asing yang masuk, maka diharapkan jumlah pengangguran di dalam negeri dapat terserap oleh lahan pekerjaan baru yang tercipta dari adanya penanaman modal asing tersebut. Akan tetapi, dijelaskan juga bahwa proses penanaman modal asing tetap harus diawasi oleh pemerintah karena terdapat suatu risiko yang justru dapat meningkatkan angka pengangguran. Pendapat tersebut didasarkan pada kondisi negara berkembang ketika suatu perusahaan asing yang masuk menggunakan teknik produksi bersifat padat modal (*capital-intensive*), sehingga kurang sesuai apabila digunakan di negara berkembang yang mayoritas memiliki padat karya atau jumlah tenaga kerja melimpah.

2.2.2 Inflasi dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Teori-teori yang telah berkembang seperti pandangan-pandangan yang dikemukakan kaum moneteris mengenai inflasi mengatakan, inflasi merupakan fenomena ekonomi mengenai pertumbuhan uang yang beredar yang dapat mempengaruhi kesempatan kerja. Menurut Nanga (2005:248) inflasi yang terjadi pada perekonomian di suatu daerah memiliki beberapa dampak dan akibat yang diantaranya adalah inflasi dapat menyebabkan perubahan-perubahan output dan tenaga kerja, dengan cara memotivasi perusahaan untuk memproduksi lebih atau kurang dari yang telah dilakukannya tergantung intensitasi inflasi yang terjadi. Apabila inflasi yang terjadi dalam perekonomian masih tergolong ringan,

perusahaan berusaha menambah jumlah output atau produksi karena inflasi yang ringan dapat mendorong semangat kerja produsen dari naiknya harga yang mana masih dapat dijangkau oleh produsen. Keinginan perusahaan untuk menambahkan output tentu juga dibarengi oleh penambahan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja. Pada kondisi tersebut permintaan tenaga kerja akan meningkat, yang selanjutnya meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang ada dan pada akhirnya mendorong laju perekonomian melalui peningkatan pendapatan nasional. Sebaliknya, apabila inflasi yang terjadi tergolong berat (*hyper inflation*) maka perusahaan akan mengurangi jumlah output akibat tidak terbelinya faktor-faktor produksi dan perusahaan juga akan mengurangi jumlah penggunaan tenaga kerja sehingga penyerapan tenaga kerja semakin berkurang dan pengangguran bertambah.

Amri (2007), menjelaskan mengenai kurva philips bahwa teori A.W. Phillips muncul karena pada saat tahun 1929, terjadi depresi ekonomi di Amerika Serikat, hal ini berdampak pada kenaikan inflasi yang tinggi dan diikuti dengan pengangguran yang tinggi pula dengan berdasarkan pada fakta itulah A.W. Phillips mengamati hubungan antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran. Hasil pengamatannya, ternyata ada hubungan yang erat antara Inflasi dengan tingkat pengangguran. Hasil pengamatan Phillips ini dikenal dengan kurva Phillips.

A.W Phillips menggambarkan hubungan antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Naiknya permintaan agregat, berdasarkan teori permintaan, permintaan akan naik, yang kemudian menyebabkan harga akan naik pula, untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output). Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja, maka dengan naiknya harga- harga (inflasi) pengangguran akan berkurang. Kurva Philips ini hanya berlaku pada tingkat inflasi ringan dan dalam jangka pendek. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan harga yang membuat perusahaan meningkatkan jumlah produksinya dengan harapan memperoleh laba yang lebih tinggi namun, jika inflasi yang terjadi adalah hyper inflation, kurva

Philips tidak berlaku lagi. Pada saat inflasi tinggi yang tidak dibarengi dengan kemampuan masyarakat, perusahaan akan mengurangi jumlah penggunaan tenaga kerja sehingga jumlah pengangguran akan bertambah (Sucitrawati dan Arka, 2012).

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya digunakan sebagai referensi dan berhubungan dengan penelitian ini antara lain untuk memperjelas perbedaan antara penelitian sekarang dengan sebelumnya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mathavee dan Mohamed (2016) dengan judul “*The impacts of China’s FDI on employment in Thailand’s industrial sector: A dynamic VAR (vector auto regression) approach*” menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh dalam meningkatkan lapangan kerja sektor industri di Thailand. Hal tersebut juga didukung oleh variabel konsumsi swasta yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja karena struktur investasi skala besar dapat menyebabkan penciptaan lapangan kerja di sektor industri.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Wong dan Tang (2011) dengan judul “*Foreign Direct Investment and Employment in Manufacturing and Service Sectors : Fresh Empirical Evidence from Singapore*” dari hasil analisa data yang dilakukan menjelaskan bahwa Foreign Direct Investment pada sektor manufaktur dan jasa menyerap tenaga kerja tertinggi di Singapura.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Sidki (2016) dengan judul “Pengaruh Penanaman Modal Asing Langsung terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 1986-2014” menunjukkan bahwa *Foreign Direct Investment* berpengaruh positif dan memiliki keseimbangan jangka panjang terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Cyvers dan Soeng (2011) dengan judul “*The effects of Belgian outward direct investment in European high-wage and low-wage countries on employment in Belgium*” dari hasil penelitian menunjukkan bahwa *Foreign Direct Investment* dan *home-country employment* berkorelasi positif.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Zamzami, Mustika, dan Edy (2015) dengan judul “Analisis Pengaruh *Foreign Direct Investment* terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Pertanian, Manufaktur, dan Pertambangan di Indonesia” dari hasil analisa data *Foreign Direct Investment* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian, dan *Foreign Direct Investment* tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur dan sektor pertambangan.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Vanda (2013) dengan judul “Penanaman Modal Asing dan Penyerapan Tenaga kerja di Sektor Industri” Dari hasil penelitian nilai keseluruhan sektor investasi menunjukkan perbedaan karakteristik dari masing-masing industri dalam menyerap tenaga kerja. Dan penyerapan tenaga kerja tertinggi pada sektor Industri Tekstil.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Chen, Hsu, dan Wang (2012) dengan judul “*Effect of outward FDI on home-country exports competitiveness: The role of location and industry heterogeneity*” dari hasil analisa data Koefisien FDI positif dan signifikan terhadap ekspor di Taiwan. Hal tersebut menunjukkan taiwan mampu bersaing dalam mengembangkan produksi dalam negerinya.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2014) dengan judul “Analisis Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Output Sektor Industri di Bekasi” dari hasil penelitian output sektor industri berpengaruh positif signifikan terhadap output total kabupaten bekasi. Dan pada variabel investasi dan tenaga kerja berpengaruh pada output sektor industri.
9. Penelitian yang dilakukan oleh Alhiriani (2013) dengan judul “Pengaruh Investasi dan Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Manufaktur di Sulawesi Selatan” dari hasil analisa data Variabel PMDN dan upah tidak memiliki pengaruh yang signifikan, sementara PMA memiliki pengaruh yang signifikan tetapi negatif terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri manufaktur di Sulawesi Selatan.
10. Penelitian yang dilakukan oleh Chusna (2013) dengan judul “Pengaruh Laju Pertumbuhan Sektor Industri, Investasi, dan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1980-2011” dari hasil penelitian

variabel laju pertumbuhan sektor industri tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Provinsi Jawa Tengah. Namun pada variabel investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Provinsi Jawa Tengah. Variabel upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah.

11. Penelitian yang dilakukan oleh Indradewa dan Natha (2015) dengan judul “Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali” dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat inflasi, PDRB dan upah minimum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali tahun 1994-2013.
12. Penelitian yang dilakukan oleh Rizvi dan Nishat (2009) dengan judul “*The Impact of Foreign Direct Investment on Employment Opportunities: Panel Data Analysis: Empirical Evidence from Pakistan, India and China*” berdasarkan pada hasil penelitian FDI tidak memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja. Dari ketiga negara yang diteliti, yaitu Cina, India, dan Pakistan, hanya Cina yang menunjukkan FDI berdampak terhadap jumlah tenaga kerja terserap.
13. Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2013) dengan judul “Dampak Penurunan Ekspor Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja” berdasarkan pada hasil penelitian total ekspor mengalami penurunan dan penurunan terjadi pada ekspor non migas. Penurunan ekspor non migas tersebut secara keseluruhan akan mengakibatkan berkurangnya kesempatan kerja.

Perbedaan atau kelebihan dari penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yakni, dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel independen makro ekonomi penanaman modal asing, ekspor, dan inflasi. Pada penelitian sekarang untuk ekspor menggunakan data nilai ekspor *Free On Board* dan untuk inflasi menggunakan nilai inflasi secara umum sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan inflasi dengan indeks harga konsumen. Penelitian sekarang bertujuan melihat pengaruh masing-masing variabel yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Indonesia secara keseluruhan tidak berfokus pada tiap sektor.

Untuk memperjelas perbedaan antara penelitian sekarang dan penelitian terdahulu maka dibuatlah Tabel 2.1 seperti di bawah ini:

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian	Judul Penelitian	Metodologi	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Mathavee dan Mohamed (2016)	<i>The impacts of China's FDI on employment in Thailand's industrial sector: A dynamic VAR (vector auto regression) approach</i>	<i>VAR (vector auto regression)</i>	Penyerapan tenaga kerja, Ekspor, Manufaktur, PMA China, Sektor industri	Pengeluaran pemerintah berpengaruh dalam meningkatkan lapangan kerja sektor industri di Thailand. Konsumsi swasta memiliki pengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja karena struktur investasi skala besar dapat menyebabkan penciptaan lapangan kerja di sektor industri.
2.	Wong dan Tang (2011)	<i>Foreign Direct Investment and Employment in Manufacturing and Service Sectors : Fresh Empirical Evidence from Singapore</i>	<i>Autoregressive distributed lag (ARDL), Causality Granger</i>	Kausalitas, PMA, Penyerapan tenaga kerja	<i>Foreign Direct Investment</i> pada sektor manufaktur dan jasa berpengaruh menyerap tenaga kerja tertinggi di Singapura.
3.	Sidki (2016)	Pengaruh Penanaman Modal Asing Langsung terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 1986-2014	Ordinary Least Square, pendekatan Johansen Cointegration	FDI, Nilai Tukar, Suku Bunga Pinjaman, Tenaga Kerja	Hasilnya menunjukkan bahwa FDI berpengaruh positif dan memiliki keseimbangan jangka panjang terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

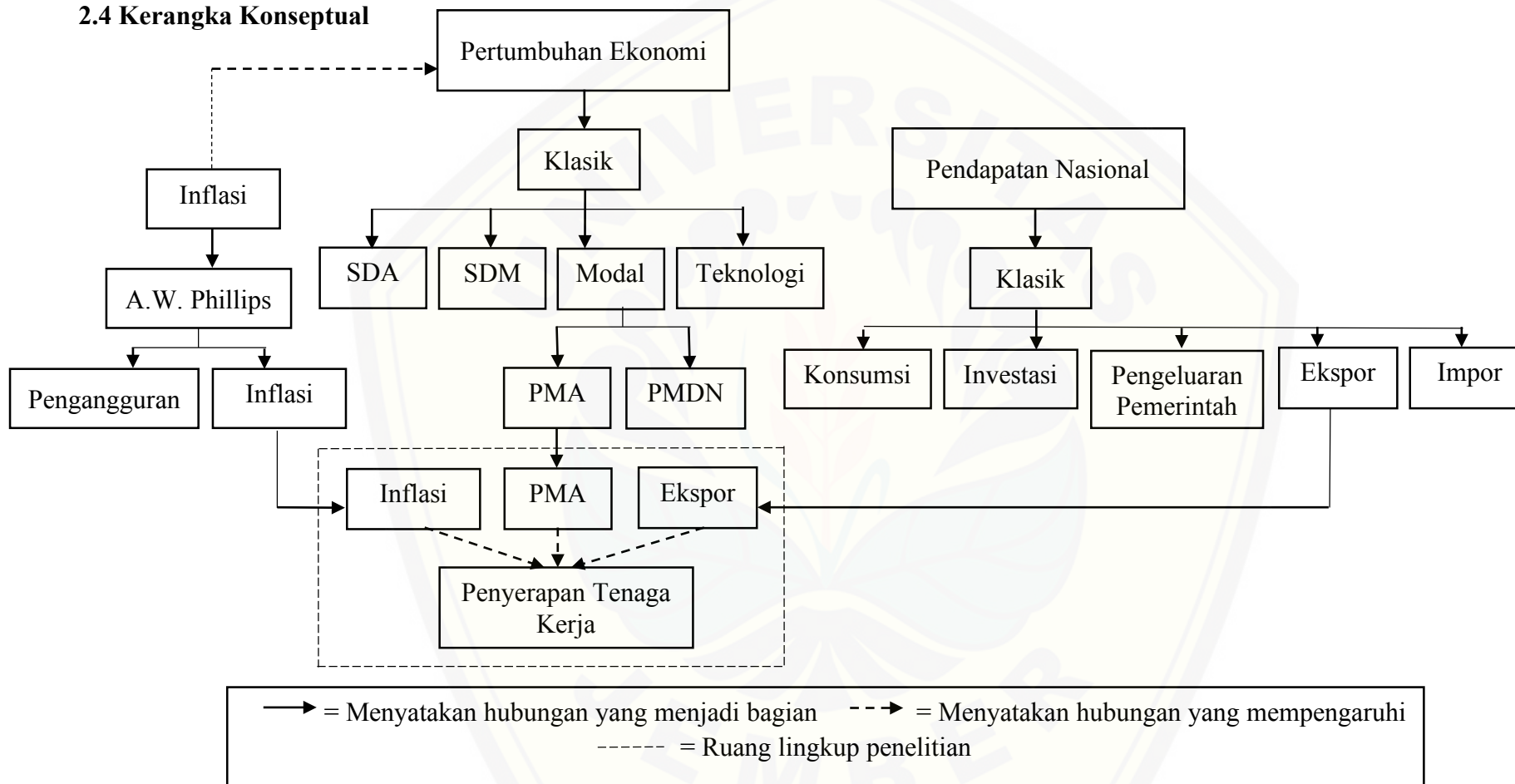
4.	Cyvers dan Soeng (2011)	<i>The effects of Belgian outward direct investment in European high-wage and low-wage countries on employment in Belgium</i>	<i>Ordinary Least Square</i> , pendekatan Fixed Effect	PMA, Penyerapan tenaga kerja, Ekonomi tenaga kerja, Pertumbuhan ekonomi	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa arus penanaman modal asing dan <i>home-country employment</i> berkorelasi positif.
5.	Zamzami, Mustika, dan Edy (2015)	Analisis Pengaruh Foreign Direct Investment terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Pertanian, Manufaktur, dan Pertambangan di Indonesia	Regresi Sederhana	FDI, Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Pertambangan dan Manufaktur	FDI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian, dan FDI tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur dan sektor pertambangan.
6.	Vanda (2013)	Penanaman Modal Asing dan Penyerapan Tenaga kerja di Sektor Industri	<i>Pool Least Square</i>	FDI, Penyerapan Tenaga Kerja, Industri	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai keseluruhan sektor investasi menunjukkan perbedaan karakteristik dari masing-masing industri dalam menyerap tenaga kerja. Dan penyerapan tenaga kerja tertinggi pada sektor Industri Tekstil.
7.	Chen, Hsu, dan Wang (2012)	<i>Effect of outward FDI on home-country exports competitiveness: The role of location and industry heterogeneity</i>	Panel Regresi	Ekspor, Industri Manufaktur, FDI	Koefisien FDI positif dan signifikan terhadap ekspor di Taiwan. Hal tersebut menunjukkan taiwan mampu bersaing dalam mengembangkan produksi dalam negerinya.

8.	Dewi (2014)	Analisis Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Output Sektor Industri di Bekasi	<i>Ordinary Least Square</i>	Investasi, Tenaga Kerja, Industri	Output sektor industri berpengaruh positif signifikan output total kabupaten bekasi. Investasi dan tenaga kerja berpengaruh pada output sektor industri.
9.	Alhiriani (2013)	Pengaruh Investasi dan Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Manufaktur di Sulawesi Selatan	<i>Two Stage Least Square</i>	Penyerapan Tenaga Kerja, Pertumbuhan Ekonomi, PDRB, PMA, PMDN, Upah	Variabel PMDN dan upah tidak memiliki pengaruh yang signifikan, sementara PMA memiliki pengaruh yang signifikan tetapi negatif terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri manufaktur di Sulawesi Selatan.
10.	Chusna (2013)	Pengaruh Laju Pertumbuhan Sektor Industri, Investasi, dan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1980-2011	Analisis Regresi Linier Berganda	Pertumbuhan Industri, Investasi, Upah, Penyerapan Tenaga Kerja	Variabel laju pertumbuhan sektor industri tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Provinsi Jawa Tengah. Variabel investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Provinsi Jawa Tengah. Variabel upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah.

11.	Indradewa dan Natha (2015)	Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali	Regresi Linier Berganda	Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali, Inflasi, PDRB dan Upah Minimum	Tingkat inflasi, PDRB dan upah minimum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali tahun 1994-2013.
12.	Rizvi dan Nishat (2009)	<i>The Impact of Foreign Direct Investment on Employment Opportunities: Panel Data Analysis: Empirical Evidence from Pakistan, India and China</i>	<i>Unit root tests (IPS), Seemingly Unrelated Regression (SUR)</i>	Penyerapan Tenaga Kerja, Penanaman Modal Asing, PDB	FDI tidak memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja. Dari ketiga negara yang di teliti, yaitu Cina, India, dan Pakistan, hanya Cina yang menunjukkan FDI berdampak terhadap jumlah tenaga kerja terserap.
13.	Wibowo (2013)	Dampak Penurunan Ekspor Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	Analisis Input-Output	Dampak Ekspor, Penyerapan Tenaga Kerja, Pergeseran Tenaga Kerja	Berdasarkan pada hasil penelitian total ekspor mengalami penurunan dan penurunan terjadi pada ekspor non migas. Penurunan ekspor non migas tersebut secara keseluruhan akan mengakibatkan berkurangnya kesempatan kerja.

Sumber: Emerald, Science Direct, Researchgate, Jurnal LIPI, Jurnal Kemenkeu, Skripsi Univesitas Indonesia, Skripsi Institut Teknologi Bandung, Skripsi Universitas Gajah Mada.

2.4 Kerangka Konseptual



Sumber : Beberapa sumber yang diolah peneliti.

2.4.1 Penjelasan Kerangka Konseptual

Pertumbuhan ekonomi menurut teori klasik dipengaruhi oleh sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan teknologi. Sumber daya manusia dalam hal ini adalah tenaga kerja. Terdapat dua jenis modal yakni penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, hal ini berdasarkan dari mana sumber modal tersebut. Teknologi merupakan faktor pendukung input produksi dari sumber daya alam, tenaga kerja. Selanjutnya pendapatan nasional menurut teori klasik yakni konsumsi masyarakat, investasi, pengeluaran belanja pemerintah, ekspor, dan impor. Dalam variabel inflasi berasal dari teori kurva Phillips yang menyatakan bahwa adanya hubungan antara pengangguran dan inflasi. Inflasi itu sendiri nantinya memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi. Sehingga dalam penelitian ini berfokus pada variabel inflasi di Indonesia, penanaman modal asing di Indonesia, dan ekspor di Indonesia yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

2.5 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan dalam suatu penelitian yang kebenarannya harus diuji. Berdasarkan kerangka konseptual di atas, maka di rumuskanlah hipotesis sebagai berikut:

1. Penanaman modal asing di Indonesia berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
2. Ekspor berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
3. Inflasi berpengaruh negatif dan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

BAB 3. METODE PENELITIAN

Bab 3 memaparkan secara rinci mengenai metode penelitian yang digunakan sebagai langkah dan prosedur yang dilakukan dalam pengumpulan data atau informasi empiris guna memecahkan permasalahan dan menguji hipotesis penelitian. Serta suatu cara untuk dapat memahami objek-objek yang menjadi sasaran atau tujuan dari suatu penelitian. Oleh karena itu pemilihan metode harus menyesuaikan dengan tujuan penelitian yang bersangkutan.

Bab 3 terdiri atas subbab 3.1 yang membahas mengenai jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian dan subbab 3.2 membahas mengenai jenis dan sumber data. Kemudian dilanjutkan subbab 3.3 mengenai spesifikasi model yang digunakan dalam penelitian, sedangkan subbab 3.4 menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian. Terakhir yaitu subbab 3.5 akan memaparkan tentang penjabaran variabel yang digunakan.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *explanatory research* yaitu untuk menguji hipotesis antar variabel yang dihipotesiskan. Dalam penelitian ini terdapat hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Hipotesis itu menggambarkan hubungan antara dua variabel, untuk mengetahui apakah suatu variabel berasosiasi ataukah tidak dengan variabel lainnya, atau apakah variabel disebabkan atau dipengaruhi atau tidak oleh variabel lainnya (Sani dan Vivin 2013:181).

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data penelitian ini yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, BKPM, Bappenas. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penyerapan tenaga kerja di Indonesia, penanaman modal asing yang masuk ke Indonesia, ekspor, dan inflasi. Penelitian ini menggunakan data tahun 2007 hingga tahun 2016, dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana kondisi penyerapan tenaga kerja

di Indonesia satu tahun sebelum krisis ekonomi global AS hingga setelah masa krisis tersebut terjadi.

3.3 Spesifikasi Model

Model umum yang digunakan untuk mengestimasi pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia dalam penelitian ini merujuk pada hasil studi dari Okoro dan Johnson (2014) yang menganalisis tentang pengaruh *foreign direct investment* terhadap penciptaan lapangan kerja di Nigeria serta penelitian oleh Chen, Hsu, dan Wang (2012) yang menganalisis tentang Effect of outward FDI on home-country exports competitiveness: The role of location and industry heterogeneity. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$EMP = \beta_0 + \beta_1 FDI + \beta_2 EXR + \beta_3 INT + u \dots\dots\dots(3.1)$$

Dimana :

EMP = Penyerapan Tenaga Kerja (Jiwa)

FDI = Penanaman Modal Asing (US Dolar)

EXR = Nilai Tukar Valuta Asing (US Dolar)

INT = Suku Bunga Pinjaman (Persentase)

β_0 = Konstanta

β = Koefisien regresi yang ditaksir

u = Komponen *error*

$$FDI = \beta_0 + \beta_1 EXP + \beta_2 INF + u \dots\dots\dots(3.2)$$

Dimana :

FDI = Penanaman Modal Asing

EXP = Ekspor

INF = Inflasi

β_0 = Konstanta

β = Koefisien regresi yang ditaksir

u = Komponen *error*

$$EMP = \beta_0 + \beta_1 FDI + \beta_2 EXP + \beta_3 INF + u$$

Dimana :

EMP = Penyerapan Tenaga Kerja (Jiwa)

FDI = Penanaman Modal Asing (Juta Dolar AS)

EXP = Ekspor (Juta Dolar AS)

INF = Inflasi (Persentase)

β_0 = Konstanta

β = Koefisien regresi yang ditaksir

u = Komponen *error*

3.4 Metode Analisis

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu metode deskriptif dan metode panel data. Metode deskriptif merupakan metode membaca sekumpulan data dengan menggunakan bantuan tabel atau grafik agar mudah dibaca dan cepat memberikan informasi. Metode ini digunakan untuk menganalisis penyerapan tenaga kerja di Indonesia yang dilihat dari sisi penanaman modal asing dan kemudahan melakukan bisnis. Sedangkan metode analisis panel data menggunakan pendekatan *fixed effect model* (FEM), dalam metode ini diharapkan dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja.

Pada metode data panel, pendekatan *fixed effect model* (FEM) tidak secara langsung dipilih, terdapat beberapa pengujian yaitu: Uji *Chow*, Uji *Hausman*, dan Uji *Langrange Multiplier* serta uji asumsi klasik agar variabel terhindar dari asumsi multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi serta uji validitas model dengan menggunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini menggunakan *software Microsoft Excel 2010* dan *E-views 9*.

Dalam pendekatan Data panel terdapat 3 pendekatan metode, yaitu metode *Pooled Least Squared* (PLS), *Fixed Effect Model* (FE), dan *Random Effect Model* (REM).

1. *Pooled Least Square* (PLS)

Metode PLS merupakan metode paling sederhana. Pada pendekatan ini menggunakan gabungan dari seluruh data (*pooled*), sehingga terdapat $N \times T$ observasi, dimana N menunjukkan jumlah unit *cross section* dan data *times series*,

dapat meningkatkan derajat kebebasan sehingga dapat memberikan hasil estimasi yang lebih efisien. Estimasi pada pendekatan ini diasumsikan bahwa setiap unit individu memiliki intersep dan slope yang sama (tidak ada perbedaan pada dimensi kerat waktu), sehingga pada regresi panel ini data yang dihasilkan akan berlaku untuk setiap individu (Juanda, 2013)

2. *Fixed Effect Model* (FEM)

Dalam metode FEM terdapat perbedaan intersep antar individu karena setiap individu dianggap mempunyai karakteristik tersendiri. Ini berbeda dengan metode PLS yang menghasilkan parameter yang bias, karena tidak dapat membedakan observasi yang berbeda pada periode yang sama ataupun sebaliknya. Menurut Juanda (2013), dalam membedakan intersep dapat digunakan peubah *dummy*, sehingga metode ini juga dikenal dengan model *Least Square Dummy Variable* (LSDV). (Gujarati, 2004)

3. *Random Effect Model* (REM)

Random Effect Model (REM) muncul ketika antara efek individu dan regresor tidak ada korelasi. Asumsi ini membuat komponen *error* dari efek individu dan waktu dimasukkan ke dalam *error*. (Gujarati, 2004)

3.4.1 Pengujian Model Penelitian

Dari ketiga model yang telah dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini dilakukan 3 pengujian untuk memilih model yang terbaik yaitu, uji *Chow*, uji *Hausman*, dan uji *Langrange Multiplier*.

1) Uji *Chow*

Pengujian ini digunakan untuk menguji apakah intersep signifikan atau tidak, yang dapat secara langsung digunakan untuk menguji apakah lebih baik menggunakan PLS atau FEM. Dengan hipotesis sebagai berikut:

$$H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \dots = \alpha_N$$

$$H_1 : \text{satu dari } \alpha \text{ ada yang tidak sama}$$

Dasar penolakan terhadap H_0 adalah menggunakan F-statistik yaitu:

$$F = \frac{R_{DV}^2 - R_P^2}{1 - R_{DV}^2} \cdot \frac{NT - N - K}{N - K}$$

Dimana :

R_{DV}^2 = Koefisien determinasi LSDV

R_p^2 = Koefisien determinasi PLS

K = banyaknya peubah

Jika nilai F-stat hasil pengujian lebih besar dari F-tabel, maka cukup bukti untuk melakukan penolakan terhadap hipotesis nol sehingga dugaan bahwa α adalah sama untuk semua individu dapat ditolak (Firdaus, 2011).

2) Uji *Hausman*

Uji *Hausman* dilakukan untuk pengujian asumsi ada atau tidaknya korelasi antar regresor dan efek individu, yang sekaligus untuk memilih *fixed effect* atau *random effect* sebagai model terbaik. Dalam pengujian ini dirumuskan hipotesis, yaitu:

$H_0 : E(\tau_{it} x_{it}) = 0$ atau REM adalah model yang tepat

$H_1 : E(\tau_{it} x_{it}) \neq 0$ atau FEM adalah model yang tepat

Sebagai dasar penolakan H_0 maka digunakan statistik *Hausman* dan membandingkannya dengan *Chi Square*. Statistik *Hausman* dirumuskan dengan:

$$H = (\beta_{REM} - \beta_{FEM})' (M_{FEM} - M_{REM})^{-1} (\beta_{REM} - \beta_{FEM}) \sim \chi^2(k)$$

Dimana :

M adalah matriks kovarians untuk parameter β

K adalah *degrees of freedom*

Jika nilai H hasil pengujian lebih besar dari χ^2 tabel, cukup bukti untuk melakukan penolakan terhadap H_0 sehingga model yang digunakan adalah model *fixed effect*, begitu juga sebaliknya (Firdaus, 2011).

3) Uji *Lagrange Multiplier*

Menurut Widarjono (2007: 260), untuk mengetahui apakah model *Random Effect* lebih baik dari model *Common Effect* digunakan *Lagrange Multiplier* (LM). Uji Signifikansi *Random Effect* ini dikembangkan oleh Breusch-Pagan. Pengujian didasarkan pada nilai residual dari metode *Common Effect*.

Uji LM ini didasarkan pada distribusi *Chi-Squares* dengan derajat kebebasan (*df*) sebesar jumlah variabel independen. Hipotesis nulnya adalah bahwa model

yang tepat untuk regresi data panel adalah *Common Effect*, dan hipotesis alternatifnya adalah model yang tepat untuk regresi data panel adalah *Random Effect*. Apabila nilai LM hitung lebih besar dari nilai kritis *Chi-Squares* maka hipotesis nul ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Random Effect*. Dan sebaliknya, apabila nilai LM hitung lebih kecil dari nilai kritis *Chi-Squares* maka hipotesis nul diterima yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Common Effect*. (Widarjono, 2007:260)

3.5 Uji Statistik

Tujuan dilakukannya uji statistik guna dapat mengetahui besarnya masing-masing koefisien dari variabel-variabel bebas yaitu indeks pembangunan manusia, upah minimum, dan pengangguran serta koefisien dari variabel terkait yaitu jumlah penduduk miskin dengan melakukan uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), dan determinasi berganda (R^2) (Kristanto, 2013)

3.5.1 Uji F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Uji F dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$F_h = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

Keterangan:

R^2 = Koefisien determinasi

k = Jumlah variabel independen

n = Jumlah sampel

Pengambilan keputusan adalah:

- Jika signifikansi $< 0,05$ maka H_0 diterima.
- Jika signifikansi $> 0,05$ maka H_0 ditolak.

3.5.2 Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel

independen lainnya konstan, jika asumsi normalitas yaitu $\mu_i \sim N(0, \sigma^2)$ terpenuhi, maka kita dapat menggunakan uji t untuk menguji koefisien parsial dari regresi (Ghozali, 2014). Uji t dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{\beta_1}{se(\beta_1)}$$

Keterangan:

β_1 : koefisien parameter

$se(\beta_1)$: standart error koefisien parameter

Metode pengambilan keputusan dengan berdasarkan probabilitas adalah:

- Jika signifikansi $< 0,05$ maka H_0 diterima.
- Jika signifikansi $> 0,05$ maka H_0 ditolak.

3.5.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Siagian dan Sugiarto (2006) koefisien determinasi merupakan suatu ukuran yang menunjukkan besar sumbangan dari variabel penjelas terhadap variabel respon. Dengan kata lain, koefisien determinasi menunjukkan ragam (variasi) naik turunnya Y yang diterangkan oleh pengaruh linear X (berapa bagian keragaman dalam variabel Y yang dapat dijelaskan oleh beragamnya dalam variabel X). Bila nilai koefisien determinasi sama dengan satu, berarti garis regresi yang terbentuk cocok secara sempurna dengan nilai-nilai observasi yang diperoleh. Dalam hal nilai koefisien determinasi sama dengan satu berarti ragam naik turunnya Y seluruhnya disebabkan oleh X. Dengan demikian bila nilai X diketahui, nilai Y dapat diramalkan secara sempurna. Jadi kegunaan determinasi adalah :

- a. Sebagai ukuran ketetapan atau kecocokan garis regresi yang dibentuk dari hasil pendugaan terhadap sekelompok data hasil observasi. Makin besar nilai R^2 semakin bagus garis regresi yang terbentuk. Sebaliknya makin kecil nilai R^2 makin tidak tepat garis regresi tersebut dalam mewakili data hasil observasi.
- b. Mengukur besar proporsi (presentasi) dari jumlah ragam Y yang diterangkan oleh model regresi atau untuk mengukur besar sumbangan variabel penjelas X terhadap ragam variabel respon Y.

3.5.4 Uji Asumsi Klasik

Penelitian dengan menggunakan data panel memiliki kelebihan yaitu data yang digunakan menjadi lebih informatif, variabilitasnya lebih besar, kolinearitas yang lebih rendah diantara variabel dan banyak derajat bebas (*degree of freedom*) dan lebih efisien (Hariyanto, 2005). Data panel dapat mengukur dan mendeteksi dampak dengan lebih baik dimana hal ini tidak bisa dilakukan dengan metode *time series* maupun *time cross section*.

Data panel memungkinkan mempelajari lebih kompleks mengenai perilaku yang ada dalam model sehingga pengujian data panel tidak memerlukan uji asumsi klasik (Gujarati 1992). Dengan kelebihan pada regresi data panel maka tidak harus dilakukan pengujian asumsi klasik (Verbeek, 2000:342; Gujarati, 2010:472; Wibisono, 2005).

3.6 Definisi Variabel Operasional

1. Penyerapan tenaga kerja (Y) yang dimaksud adalah berapa banyak tenaga kerja yang terserap dari penanaman modal asing, ekspor dan inflasi di Indonesia setiap tahun ketika ada perubahan pada variabel bebas yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data penyerapan tenaga kerja tahun 2007-2016 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dinyatakan dalam jiwa per tahun.
2. Penanaman Modal Asing (X_1) yang dimaksud adalah dana modal yang diterima Indonesia dari investor asing. Data yang digunakan adalah data penanaman modal asing tahun 2007-2016 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan BKPM yang dinyatakan dengan satuan juta dolar AS per tahun.
3. Ekspor (X_2) yang dimaksud adalah nilai perdagangan luar negeri berdasarkan FOB (*Free On Board*) di Indonesia tahun 2007-2016. Data yang digunakan adalah data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), dengan satuan juta dolar AS per tahun.

4. Inflasi (X_3) yang dimaksud adalah persentase inflasi (umum) tahun 2007-2016 di Indonesia. Data yang digunakan adalah data yang diukur dalam satuan persen (dalam persen) bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) per tahun.



BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode analisis kuantitatif dengan regresi data panel yang telah dilakukan Bab 4 dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penanaman modal asing memengaruhi penyerapan tenaga kerja di Indonesia selama periode tahun 2007 hingga 2016. Kondisi ini dipengaruhi oleh perdagangan bebas yang memicu pertumbuhan penanaman modal asing. Penanaman modal asing memberikan dampak positif yang kuat dalam pasar tenaga kerja dimana memberikan keuntungan pada penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
2. Ekspor memengaruhi penyerapan tenaga kerja di Indonesia selama periode tahun 2007 hingga 2016. Namun, pengaruh yang diberikan relatif cukup kecil setiap peningkatan ekspor. Hal ini disebabkan oleh sektor manufaktur sebagai komoditas utama ekspor Indonesia memiliki banyak kelemahan yang membuat kinerjanya terus menurun.
3. Inflasi memengaruhi penyerapan tenaga kerja di Indonesia selama periode tahun 2007 hingga 2016 namun memberikan pengaruh negatif. Inflasi memberikan pengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja hal ini terjadi pada inflasi dalam kategori tinggi.

5.2 Saran

Tenaga kerja merupakan indikator penting dalam pembangunan karena memiliki fungsi yang menentukan dalam pembangunan, yaitu: (a) tenaga kerja merupakan faktor utama dalam menjalankan proses produksi serta pendistribusian barang dan jasa, (b) tenaga kerja merupakan sasaran untuk mengembangkan pasar. Dengan adanya kedua fungsi tersebut dapat dikatakan bahwa tenaga kerja merupakan penggerak dalam pembangunan. Oleh karena itu, terdapat beberapa

saran sebagai arahan dan rekomendasi kebijakan ke depan dari peneliti agar penyerapan tenaga kerja dapat ditingkatkan untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan yang terjadi di Indonesia, yakni sebagai berikut:

1. Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis bertujuan memberikan saran kepada pemerintah agar dapat memperhatikan pembangunan atau penyediaan infrastruktur yang merata diseluruh wilayah dalam rangka menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan adanya kemudahan dalam melakukan bisnis disetiap wilayah tentu saja akan menambah nilai penanaman modal asing setiap tahunnya. Minat investor asing tidak hanya melihat potensi yang dimiliki oleh wilayah tersebut, tetapi kemudahan dalam mendirikan bisnis di wilayah tersebut yang akan menjadi pertimbangan dalam investor menanamkan modalnya. Selain infrastruktur yang memadai, keamanan wilayah juga menjadi faktor tambahan yang akan dipertimbangkan oleh investor asing. Oleh sebab itu, pemerintah bersama masyarakat diharapkan dapat berintegrasi dengan baik dalam rangka meningkatkan penanaman modal asing yang nantinya dapat menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan. Indonesia akan mengalami era bonus demografi pada tahun 2025-2030, apabila tidak dipersiapkan dengan baik mulai saat ini, maka era bonus demografi penduduk usia produktif tersebut akan menjadi beban bagi pemerintah karena dikhawatirkan semakin banyak pengangguran di Indonesia.
2. Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis bertujuan memberikan saran kepada pemerintah agar dapat mengembangkan dan memfasilitasi produk-produk lokal Indonesia disamping potensi alam sebagai penyumbang terbesar ekspor Indonesia. Kondisi Indonesia sebagai pasar yang besar, dengan jumlah penduduk yang banyak dapat mengembangkan potensi yang dimiliki dengan tersedianya sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dengan semakin terbukanya perdagangan internasional, terlebih telah dimulainya implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), barang-barang dari luar akan semakin mudah masuk ke Indonesia sekaligus

menjadi tantangan produk lokal dalam negeri. Oleh sebab itu diharapkan pemerintah dapat memfasilitasi dalam perkembangan produk dalam negeri agar dapat bersaing dengan produk luar. Dengan daya saing yang tinggi, produk-produk lokal tidak hanya akan menikmati pasar domestik yang besar, tetapi juga berpeluang meningkatkan produksinya untuk tujuan ekspor. Artinya, jika ekspor Indonesia ditingkatkan, maka tidak hanya penyerapan tenaga kerja yang meningkat namun pertumbuhan ekonomi Indonesia juga akan mengalami peningkatan yang signifikan. Diperlukan penguatan daya saing karena hal inilah yang menjadi salah satu tantangan Indonesia saat ini.

3. Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis bertujuan memberikan saran kepada pemerintah bersama dengan Bank Indonesia dalam mengendalikan tingkat inflasi di Indonesia. Inflasi sebagai salah satu dinamika perekonomian harus diprioritaskan pemerintah sebab dampaknya langsung terasa di masyarakat. Inflasi dapat diatasi selain dengan kebijakan moneter, kebijakan fiskal. Salah satunya dengan meningkatkan produktifitas atau hasil produksi. Bila produksi dapat ditingkatkan maka penawaran yang ada dapat mengimbangi permintaan yang ada sehingga inflasi dapat terkendali. Peningkatan produksi juga akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Inflasi merupakan persoalan yang sangat kompleks dan dampak kebijakan ekonomi makro adalah untuk memecahkan masalah inflasi sebagai penyebab terjadinya ketidakstabilan harga dan untuk memecahkan masalah pengangguran. Jadi kebijakan makro harus dapat mencapai sasarannya, yaitu menciptakan stabilitas harga dan dalam waktu bersamaan menciptakan kesempatan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhiriani. 2013. *Pengaruh Investasi dan Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Manufaktur di Sulawesi Selatan*.
- Amaliah, Oktaviani, R., Widyastutik. 2013. *Dampak FTA Asean China Terhadap Ekonomi makro dan Ekonomi Sektoral Indonesia*. Jurnal IPB
- Amir, M.S. 2004. *Strategi Memasuki Pasar Ekspor*. Cetakan Pertama. Jakarta: PPM
- Amri, Amir. 2010. *Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran di Indonesia*
- Ananta, Aris. 1993. *Ciri Demografis Kualitas Penduduk Dalam Pembangunan Ekonomi*. Lembaga Demografi.FEUI. Jakarta.
- Appleyard, Dennis, dan Field, Alfred J.R. 2008. *International Economic*. McGraw-Hill, New York.
- Ardiansyah. 2011. *Teori-Teori Hukum Investasi dan Penanaman Modal*. Jurnal
- Arsyad, Lincoln. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Bagian Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Asian Development Outlook. 2017. *Sustaining Development Through Public-Private Partnership*. ADB Philippines
- Bachtiar N. dan Elfindri. 2008. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Tenaga Kerja Informal Diatas UMP Di Sumbar*. Padang. Universitas Andalas
- Badan Koordinasi Penanaman Modal. 2011. *Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing 2011*. BKPM Indonesia
- , 2016. *Penanaman Modal Asing Berdasarkan Sektor Ekonomi tahun 2007-2016*. BKPM Indonesia
- , 2016. *Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Provinsi Tahun 2016*. BKPM Indonesia
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2016. *Perkembangan Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Menurut Lokasi*. Bappenas Indonesia

- , 2016. *Perkembangan Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Menurut Sektor*. Bappenas Indonesia
- Badan Pusat Statistik. 2008. *Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2008*. Katalog : 99199007. BPS. Jakarta
- , 2008. *Statistik Indonesia tahun 2008*. BPS Indonesia
- , 2009. *Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2009*. Katalog : 99199007. BPS. Jakarta
- , 2009. *Statistik Indonesia tahun 2009*. BPS Indonesia
- , 2010. *Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2010*. Katalog : 99199007. BPS. Jakarta
- , 2010. *Statistik Indonesia tahun 2010*. BPS Indonesia
- , 2011. *Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2011*. Katalog : 99199007. BPS. Jakarta
- , 2011. *Statistik Indonesia tahun 2011*. BPS Indonesia
- , 2012. *Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2012*. Katalog : 99199007. BPS. Jakarta
- , 2012. *Statistik Indonesia tahun 2012*. BPS Indonesia
- , 2013. *Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2012*. Katalog : 99199007. BPS. Jakarta
- , 2013. *Statistik Indonesia tahun 2013*. BPS Indonesia
- , 2014. *Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2014*. Katalog : 99199007. BPS. Jakarta
- , 2014. *Statistik Indonesia tahun 2014*. BPS Indonesia
- , 2015. *Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2012*. Katalog : 99199007. BPS. Jakarta
- , 2015. *Realisasi Penanaman Modal Asing di Indonesia tahun 2009-2015*. BPS Indonesia
- , 2015. *Statistik Indonesia tahun 2015*. BPS Indonesia

- , 2016. *Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2012*. Katalog : 99199007. BPS. Jakarta
- , 2016. *Statistik Indonesia tahun 2016*. BPS Indonesia
- , 2016. *Pencari Kerja Terdaftar, Lowongan Kerja Terdaftar, dan Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2000-2015*. BPS Indonesia
- , 2016. *Penduduk Angkatan Kerja, Bekerja, dan Pengangguran di Indonesia Tahun 2009-2016*. BPS Indonesia
- , 2017. *Statistik Indonesia tahun 2017*. BPS Indonesia
- BPS Papua Barat. 2008. *Papua Barat dalam angka 2008*. BPS
- , 2009. *Papua Barat dalam angka 2009*. BPS
- Bank Dunia. 2011. *Perkembangan Triwulan Perekonomian Indonesia*. World Bank Group Indonesia
- , 2016. *Perkembangan Triwulan Perekonomian Indonesia*. World Bank Group Indonesia
- Bank Indonesia. 2008. *Buku Laporan Perekonomian Indonesia 2008*. BI. Jakarta
- , 2009. *Laporan Perekonomian Indonesia 2009 : Memperkuat Ketahanan, Mendorong Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional*. BI. Jakarta
- , 2010. *Buku Laporan Perekonomian Indonesia 2010*. BI. Jakarta
- , 2011. *Laporan Perekonomian Indonesia 2011. Ketahanan Perekonomian Indonesia di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global*. BI. Jakarta
- , 2014. *Laporan Perekonomian Indonesia 2014 : Memperkokoh Stabilitas, Mempercepat Reformasi Struktural untuk Memperkuat Fundamental Ekonomi*. BI. Jakarta
- , 2016. *Laporan Perekonomian Indonesia 2016*. BI. Jakarta
- Bappenas. 2008. *Laporan Perekonomian Indonesia*. Badan Pembangunan Nasional
- Berentsen, A. Menzio, G. dan Wright, R. 2009. *Inflation and unemployment in the long run*. Working Paper. Institute for Empirical Research in Economics University of Zurich.

- Basri, Munandar. 2004. *Dasar-dasar Ekonomi Internasional: Pengenalan & Aplikasi Metode Kuantitatif*. Kencana. Jakarta.
- Beyer, A. dan Farmer, R.E. 2007. *Natural rate doubts*. Journal of Economic Dynamics and Control. 31(3), pp.797-825.
- Boediono. 1981. *Ekonomi Internasional Edisi 1*, BPFE, Yogyakarta.
- . 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- . 2005. *Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur*. Simposium. Nasional Akuntansi (SNA) VIII Solo.
- Chandra, Aditiawan. 2006. *Peran Penanaman Modal Dalam Pembangunan Nasional*. Media Indonesia, 30 November 2006.
- Chandrawulan. 2011. *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*. PT Alumni. Bandung.
- Chen Y., Hsu W., dan Wang C. 2012. *Effect of Outward FDI on Home-country Exports Competitiveness: The Role of Location and Industry Heterogeneity*. Journal Of Chinese Economic and Foreign Trade Studies. Emerald Insight
- Chusna. 2013. *Pengaruh Laju Pertumbuhan Sektor Industri, Investasi, dan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1980-2011*.
- Cyvers, L. dan Soeng, R. 2011. *The Effect of Belgian Outward Direct Investment in European High-Wage and Low-Wage Countries on Employment in Belgium*. Emerald Insight.
- Dajan, Anto 1996. *Pengantar Metode Statistik Jilid II*, cetak kedelapan belas. Jakarta: PT. Pustaka.
- Dewi, Merlynda. 2014. *Analisis Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Output Sektor Industri di Bekasi*.
- Disnaker. 2010. *Laporan Ketenagakerjaan Indonesia 2010*. Dinas Ketenagakerjaan.
- Feenstra, R.C., dan C. Hong. 2007. *China's Exports And Employment*. Working Paper 13552, NBER Working Paper Series. Diunduh tanggal 28 Januari 2018 dari <http://www.nber.org/papers/w13552>.

- Firdaus, Muhammad. 2011. *Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikatif*. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara
- Galbraith, C. S., dan Galbraith, Devon M. 2007. *An empirical note on entrepreneurial activity, intrinsic religiosity and economic growth*. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 1(2), 188–201.
- Ghozali, Imam. 2014. *Structural Equation Modeling Metode Alternatif Dengan Partial Least Squares (PLS)*. Edisi 4. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar. 1992. *Basic Econometrics*. Terjemahan Sumamo Zain. Erlangga. Jakarta.
- , 2000. *Ekonometrika*. Jakarta: Erlangga.
- , 2003. *Ekonomi Dasar*. Alih Bahasa: Sumarno Zain. Jakarta: PT. Erlangga.
- , 2004. *Basic Econometrics, Fourth edition*. Singapore. McGraw-Hill Inc. Hapcin Suhairy.
- , 2010. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamdy, Hadi. 2001. *Teori dan Kebijakan Perdagangan Ekonomi Internasional*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Haris, Ratna Putri. 2015. *Penawaran Tenaga Kerja*. Universitas Hasanudin. Makassar
- Hariyanto, Bambang. 2005. *Sistem Manajemen Basis Data: Pemodelan, Perancangan, dan Terapannya*. Bandung: Informatika.
- Haug, A. dan Ian P. King. 2011. *Empirical Evidence on Inflation and Unemployment in the Long Run*. University of Otago Economics Discussion Papers No. 1109. 1-25.
- Hutagalung, P. dan Sentosa P. B. 2013. *Analisis Pengaruh Upah Minimum Dan Inflasi Terhadap Kesempatan Kerja Sektor Industri Pengolahan Besar Dan Sedang Di Jawa Tengah (35 kab/kota)*. Diponegoro Journal Of Economics. Vol 2, No.4
- Ikhsan, Mohamad. 2010. *Kebijakan Ekonomi Makro Khususnya Stabilisasi Harga dan Penanggulangan Kemiskinan*. FEB UI

- Indradewa K. dan Natha N.. 2015. *Pengaruh Inflasi, PDRB, dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali*. Jurnal Ekonomi UNUD
- Internasional Monetary Fund. 2010. *Finance & Development, Point of View: Asia: A Perspektive on the Subprime Crisis*
- Jetro Overseas Business Survey. 2010. Survey on the International Operation of Japanese Firms. <http://www.jetro.go.jp/en/reports/survey/>
- Jhingan, ML. 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta : PT Raja Gafindo Persada.
- , 2004. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta : Erlangga.
- Juanda, Bambang. 2009. *Ekonometrika Permodelan dan Pendugaan*. Bogor : IPB Press.
- , 2014. *Ekonometrika Deret Waktu Teori & Aplikasi*. Bogor : IPB Press
- Junaidi. 2008. *Potensi Klaster Agroindustri Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Jambi*. Jurnal FE-Unja
- Katryn T. dan Anggraini A. 2015. *Sumber Daya Alam & Sumber Daya Manusia untuk Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Forum Ilmiah Vol.12 No.1
- Kemendag. 2013. *Litbang Perdagangan Indonesia 2013*. Kemendag, Jakarta.
- Kemenkopmk. 2016. *Laporan Kependudukan Indonesia 2016*. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Kementrian Keuangan. 2013. *Dampak Penurunan Ekspor Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja*. Jurnal Kemenkeu.
- Kristanto. 2013. *Descriptive Statistic*. Jurnal inFestasi Vol.9 No.2
- Krugman, Paul G. dan Obstfeld, Maurice. 2000. *Ekonomi Internasional Teori dan Kebijakan*. Jakarta : Rajawali Press.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta : YKPN.
- , 2012. *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN

- Kuncoto, Haryo. 2002. *Upah dan Sistem Penyerapan Tenaga Kerja*. Penerbit Media Jakarta.
- Mankiw, N Gregory. 2000. *Makro Ekonomi*, Edisi Keenam. Jakarta : Erlangga.
- . 2014. *The Relationship between Unemployment and the Rate of Change of Money Wages in the United Kingdom 1861-1957*. *Economica Journal*
- Mathavee, K. dan Mohamed, M. 2016. *The Impact of China's FDI on Employment in Thailand's industrial sector: A Dynamic VAR Approach*. Emerald Insight
- Nanga, Muana. 2005. *Makro Ekonomi: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Edisi Kedua. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Nasir, Muhammad. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Nopirin. 1999. *Ekonomi Internasional Edisi 3*. Jakarta: BPFE.
- Novianti, D. Sitompul. 2013. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Sumatera Utara*. *Jurnal Universitas Negeri Medan*.
- Okoro H. dan Atan A. J. 2014. *Impact of Foreign Direct Investment on Employment Generation in Nigeria: A Statistical Investigation*.
- Phillips, A, W. 2005. *The Relation between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, 1861- 1957*. *Economica*, New Series, Vol. 25, No. 100 (Nov.,1958), 283-299.
- Prasetiono, D. W. 2010. Analisis pengaruh faktor fundamental ekonomi makro dan harga minyak terhadap saham LQ45 dalam jangka pendek dan panjang. Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Prasetyo, Eko. 2009. *Fundamental Makroekonomi*. Beta Offset. Yogyakarta.
- Priyono, Ismail. 2012. *Teori Ekonomi*. Surabaya : Dharma Ilmu.
- Rahardja P. dan Manurung M. 2006. *Teori Ekonomi Mikro Suatu. Pengantar*, Edisi Ketiga, Jakarta; Lembaga Penerbit Fakultas. Ekonomi Universitas Indonesia.
- Rizvi S. dan Nishat M. 2009. *The Impact of foreign Direct Investment on Employment Opportunities: Panel data Analysis: Empirical Evidence from Pakistan, India and China*. *Econ Papers*. Pakistan Institute of Development Economics.
- Salvatore, D. 1996. *Managerial Economics in A Global Economy*. Third edition.

McGraw-Hill, Inc, Ney York.

-----, 1997. *Ekonomi Internasional*. Alih bahasa oleh Haris Munandar edisi 5 cetak 1. Erlangga, Jakarta.

Samuelson, P. 2014. *Ilmu Makro Ekonomi*. PT. Media Global Edukasi.

Sani A. dan Vivin M. 2013. *Metodologi Penelitian Manajemen Sumber Daya Manusia : Teori, Kuesioner, dan Analisis Data*. Malang: Uin Press.

Setyowati, E. dan Fatimah, S. 2007. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi Dalam Negeri di Jawa Tengah 1980-2002*. Jurnal Ekonomi Pembangunan.

Siagian, D., dan Sugiarto. 2006. *Metode Statistika*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Siagian, Riduan. 2015. *Kualitas Sumber Daya Manusia*. Medan : Stie Bisnis Indonesia

Sidki, Hasbi. 2016. *Pengaruh Penanaman Modal Asing Langsung Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia Tahun 1986-2014*. Skripsi : Universitas Gajah Mada.

Silvia W. dan Aimon. 2013. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Inflasi di Indonesia*. Jurnal Kajian Ekonomi.

Simanjuntak, Payaman. 1985. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta : LPFE UI.

Smith dan Todaro M. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia*. Ketiga, edisi kedelapan. Jakarta : Erlangga

Sornarajah. 2010. *The International Law on Foreign Investment*. Cambridge University Press. Cambridge USA.

Sriwardiningsih, Enggal. 2010. *Dampak Penularan Krisis Global Terhadap Aliran Investasi Asing di Indonesia*. Jurnal. Jakarta : Researchgate

Sucitrawati N. dan Arka S. 2012. *Pengaruh Inflasi, Investasi dan Tingkat Upah Terhadap Tingkat Pengangguran di Bali*. Jurnal FE Udayana.

Sukirno, Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah dan Kebijakan*. Jakarta : LPFE, UI.

-----, 2005. *Mikro Ekonomi – Teori Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

- , 2008. *Teori Ekonomi Makro Edisi 3*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sumarsono, Sony. 2003. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sunariyah. 2003. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*. edisi ke tiga, UPP-AMP. YKPN
- Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Tambunan, T. 2001. *Industrialisasi di Negara Sedang Berkembang*. Jakarta : Gharis Indonesia.
- , 2001. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Todaro, Michael. 2000. *Ekonomi Untuk Negara berkembang Suatu Pengantar Tentang Prinsip dan Kebijakan Pembangunan*. Edisi Ketiga. Jakarta : Bumi Aksara.
- , 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (H. Munandar, Trans. Edisi Ketujuh ed.)*. Jakarta : Erlangga
- Todaro, M. P. dan Smith, S. C. 2006. *Pembangunan Ekonomi (alih bahasa: Haris Munandar; Puji A.L.)*. Jakarta : Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003. Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967. Tentang penanaman modal asing dan dilengkapi serta disempurnakan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1970 juga tentang penanaman modal asing.
- Vanda, Ningrum. 2013. *Penanaman Modal Asing dan Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Industri*. Jurnal Lipi
- Verbeek, Marno. 2000. *A Guide to Modern Econometrics*. KU leuven and Tilburg University.
- Wibisono. 2005. *Metode Penelitian & Analisis Data*. Jakarta: Salemba.
- Wibowo, Tri. 2013. *Dampak Penurunan Ekspor Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja*. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

- Widarjono, Agus. 2007. *Ekonometrika Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Ekonisia FE UII.
- Wiranata, S. 2004. *Pengembangan Investasi di Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, XII (1)
- Wong K. N. dan Tang T. C. 2011. *Foreign Direct Investment and Employment in Manufacturing and Service Sector : Fresh Empirical Evidence from Singapore*. Journal of Economic Studies. Emerald Insight
- Yulia, Mustika. 2015. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Ekspor*. Eco Paper
- Zamzami, Mustika C. dan Edy J. K. 2015. *Analisis Pengaruh Foreign Direct Investment terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Pertanian, Manufaktur, dan Pertambangan di Indonesia*.

LAMPIRAN

Lampiran A. Data Penyerapan Tenaga Kerja, Penanaman Modal Asing, Ekspor, dan Inflasi per Provinsi di Indonesia Tahun 2007-2016

Provinsi	Tahun	PTK	PMA	Ekspor	Inflasi
Aceh	2007	1,570,761	17.4	1,731.70	11
Aceh	2008	1,621,998	0	2,104.40	10.27
Aceh	2009	1,732,561	0.4	1,035.00	3.5
Aceh	2010	1,776,254	4.6	1,326.30	4.64
Aceh	2011	1,790,369	22.5	1,406.30	3.32
Aceh	2012	1,808,357	172.3	1,197.30	0.06
Aceh	2013	1,842,671	94.2	930.4	6.39
Aceh	2014	1,931,823	31.1	501.2	7.83
Aceh	2015	1,966,018	21.2	38.8	1.27
Aceh	2016	2,087,045	134.5	1.3	3.13
Sumatera Utara	2007	5,082,797	189.7	5,931.90	8.37
Sumatera Utara	2008	5,540,263	127.2	7,873.30	10.63
Sumatera Utara	2009	5,765,643	139.7	5,369.00	1.59
Sumatera Utara	2010	6,125,571	181.1	7,429.00	7.65
Sumatera Utara	2011	5,532,968	753.7	10,057.70	3.54
Sumatera Utara	2012	5,880,885	645.3	8,871.90	3.79
Sumatera Utara	2013	6,081,301	887.5	7,982.30	10.09
Sumatera Utara	2014	5,881,371	550.8	7,808.10	8.24
Sumatera Utara	2015	5,962,304	1,246.10	6,618.10	3.32
Sumatera Utara	2016	5,991,229	1,014.70	6,768.70	6.60
Sumatera Barat	2007	1,889,406	58.70	1,512.80	6.90
Sumatera Barat	2008	1,956,378	28.10	2,379.70	12.68
Sumatera Barat	2009	1,998,922	0.2	1,344.30	2.05
Sumatera Barat	2010	2,041,454	7.9	2,214.60	7.84
Sumatera Barat	2011	2,051,696	22.9	3,030.00	5.37
Sumatera Barat	2012	2,085,483	75	2,362.90	4.16
Sumatera Barat	2013	2,061,109	91.4	2,208.60	10.87
Sumatera Barat	2014	2,180,336	112.1	2,105.40	11.9
Sumatera Barat	2015	2,184,599	57.1	1,753.10	0.85
Sumatera Barat	2016	2,347,911	79.3	1,708.10	5.02
Riau	2007	1,907,946	724	8,974.20	7.53
Riau	2008	2,055,863	460.9	12,453.20	9.02
Riau	2009	2,067,357	251.6	8,993.70	1.94
Riau	2010	2,170,247	86.6	11,770.90	7

Provinsi	Tahun	PTK	PMA	Ekspor	Inflasi
Riau	2011	2,311,171	212.3	16,485.30	5.09
Riau	2012	2,399,851	1,152.90	15,516.80	3.35
Riau	2013	2,479,493	1,304.90	14,195.70	8.83
Riau	2014	2,518,485	1,369.50	14,020.80	8.53
Riau	2015	2,554,296	653.4	11,415.90	2.71
Riau	2016	2,765,946	869.1	10,889.40	4.19
Jambi	2007	1,146,861	17.6	0.00	7.42
Jambi	2008	1,224,483	36.1	0.00	11.57
Jambi	2009	1,260,592	40.5	813.4	1.85
Jambi	2010	1,462,405	37.2	1,488.10	10.52
Jambi	2011	1,393,554	19.5	2,383.60	2.76
Jambi	2012	1,436,527	156.3	4,139.70	4.22
Jambi	2013	1,397,247	34.3	4,021.30	8.74
Jambi	2014	1,491,038	51.4	3,986.80	8.72
Jambi	2015	1,550,403	107.7	2,635.80	1.37
Jambi	2016	1,624,522	61	1,894.20	4.54
Sumatera Selatan	2007	3,057,518	213.8	2,688.90	8.21
Sumatera Selatan	2008	3,191,355	114.7	3,403.70	11.15
Sumatera Selatan	2009	3,196,894	56.8	1,952.80	2.88
Sumatera Selatan	2010	3,421,193	186.3	3463.9	6.02
Sumatera Selatan	2011	3,417,374	557.3	4,991.10	3.78
Sumatera Selatan	2012	3,582,099	786.4	4,272.30	2.72
Sumatera Selatan	2013	3,524,883	485.9	3,824.70	7.04
Sumatera Selatan	2014	3,692,806	1,056.50	2,947.80	8.38
Sumatera Selatan	2015	3,695,866	645.8	2,245.80	3.05
Sumatera Selatan	2016	3,998,637	2,793.50	1,783.20	3.68
Bengkulu	2007	767,107	0.00	0.00	5
Bengkulu	2008	770,642	13.00	0.00	13.44
Bengkulu	2009	787,308	1.1	109.1	4.18
Bengkulu	2010	815,741	25.1	129.2	9.08
Bengkulu	2011	837,674	43.1	246.8	3.96
Bengkulu	2012	853,784	30.4	448.4	4.61
Bengkulu	2013	832,048	22.3	322.7	9.94
Bengkulu	2014	868,794	19.3	241.4	10.85
Bengkulu	2015	904,317	20.6	1,559.40	3.25
Bengkulu	2016	964,971	55.7	1,588.90	5
Lampung	2007	3,281,351	124.5	1,540.50	6.58

Provinsi	Tahun	PTK	PMA	Ekspor	Inflasi
Lampung	2008	3,313,553	67	2,743.70	14.82
Lampung	2009	3,387,175	32.7	2,258.70	2.17
Lampung	2010	3,737,078	30.7	2,467.40	9.95
Lampung	2011	3,368,486	79.5	3,222.60	4.24
Lampung	2012	3,516,856	114.3	3,698.40	4.3
Lampung	2013	3,471,602	46.8	3,892.30	7.56
Lampung	2014	3,673,158	1,056.50	3,856.70	8.36
Lampung	2015	3,635,258	645.8	2,315.90	4.65
Lampung	2016	3,931,321	2,793.50	1,873.60	2.75
Kep. Bangka Belitung	2007	475,006	0.00	0.00	2.64
Kep. Bangka Belitung	2008	492,949	1.70	0.00	18.4
Kep. Bangka Belitung	2009	506,284	22.4	1,269.90	1.88
Kep. Bangka Belitung	2010	585,136	22	1,787.50	9.36
Kep. Bangka Belitung	2011	555,258	146	2,833.00	5
Kep. Bangka Belitung	2012	585,493	59.2	1,761.50	6.57
Kep. Bangka Belitung	2013	597,613	112.4	1,596.40	8.71
Kep. Bangka Belitung	2014	604,223	105	1,653.10	6.81
Kep. Bangka Belitung	2015	623,949	82.7	1,191.10	4.66
Kep. Bangka Belitung	2016	686,830	52.7	1,290.60	7.78
Kep. Riau	2007	525,797	52.8	5,763.80	0
Kep. Riau	2008	612,667	161.4	6,081.20	11.9
Kep. Riau	2009	626,456	230.7	5,541.80	1.43
Kep. Riau	2010	769,486	165.7	7,427.80	6.17
Kep. Riau	2011	763,349	219.7	8,932	3.32
Kep. Riau	2012	801,510	537.1	8,264.00	3.92
Kep. Riau	2013	806,073	315.7	9,064.60	10.09
Kep. Riau	2014	819,656	329.1	8,875.80	7.49
Kep. Riau	2015	836,670	640.4	7,531.40	2.46
Kep. Riau	2016	859,813	519.1	7,392.30	3.06
DKI Jakarta	2007	3,842,944	4,676.90	32,127.20	6.04
DKI Jakarta	2008	4,191,966	9,927.60	36,025.00	11.11
DKI Jakarta	2009	4,118,390	5,510.80	32,408.50	2.34
DKI Jakarta	2010	4,689,761	6,429.30	39,519.80	6.21
DKI Jakarta	2011	4,528,589	4,824.70	46,349	3.97
DKI Jakarta	2012	4,823,858	4,107.70	48,018.20	4.52
DKI Jakarta	2013	4,668,239	2,591.10	47,288.60	8
DKI Jakarta	2014	4,634,369	4,509.40	48,018	8.95

Provinsi	Tahun	PTK	PMA	Ekspor	Inflasi
DKI Jakarta	2015	4,724,029	3,619.40	46,355.30	3.3
DKI Jakarta	2016	4,861,832	3,398.20	45,993.20	2.37
Jawa Barat	2007	15,853,822	1,326.90	242.10	5.25
Jawa Barat	2008	16,480,395	2,552.20	195.10	11.11
Jawa Barat	2009	16,901,430	1,934.40	148.70	2.02
Jawa Barat	2010	16,942,444	1,692.00	345	6.62
Jawa Barat	2011	17,407,516	3,839.40	511.10	3.1
Jawa Barat	2012	18,615,753	4,210.70	421.50	3.86
Jawa Barat	2013	18,731,943	7,124.90	425.8	9.15
Jawa Barat	2014	19,230,943	6,562.00	316.4	7.6
Jawa Barat	2015	18,791,482	5,738.70	177.2	2.73
Jawa Barat	2016	19,202,038	5,470.90	116.2	2.27
Jawa Tengah	2007	16,304,058	100.70	3,443.80	6.75
Jawa Tengah	2008	15,463,658	135.60	3,282.90	9.55
Jawa Tengah	2009	15,835,382	83.1	3,059	3.32
Jawa Tengah	2010	15,809,447	59.1	3,863.20	6.88
Jawa Tengah	2011	15,822,765	175	4,678.30	2.68
Jawa Tengah	2012	16,531,395	241.5	4,637.10	4.24
Jawa Tengah	2013	16,469,960	464.3	5,319.70	7.99
Jawa Tengah	2014	16,550,682	463.4	5,626.90	8.22
Jawa Tengah	2015	16,435,142	850.4	5,369.80	2.73
Jawa Tengah	2016	16,511,136	1,030.80	5,384.60	2.36
DI Yogyakarta	2007	1,774,245	0.80	0.00	7.99
DI Yogyakarta	2008	1,892,205	16.70	0.00	9.88
DI Yogyakarta	2009	1,895,648	8.1	1,635.90	3.6
DI Yogyakarta	2010	1,775,148	4.9	3,043	7.38
DI Yogyakarta	2011	1,839,824	2.4	4,001.90	3.88
DI Yogyakarta	2012	1,906,145	84.9	4,206.90	4.31
DI Yogyakarta	2013	1,886,071	29.6	3,706.90	7.32
DI Yogyakarta	2014	1,956,043	64.9	5,835.20	6.59
DI Yogyakarta	2015	1,891,218	89.1	4,950.40	3.09
DI Yogyakarta	2016	2,042,400	19.6	6,099.80	2.29
Jawa Timur	2007	18,751,421	1,689.60	11,611.10	6.48
Jawa Timur	2008	18,882,277	475.1	10,956.00	9.66
Jawa Timur	2009	19,305,056	422.1	10,385.70	3.63
Jawa Timur	2010	18,698,108	1,769.20	14,209.80	6.96
Jawa Timur	2011	18,463,606	1,312.00	16,964.30	4.09

Provinsi	Tahun	PTK	PMA	Ekspor	Inflasi
Jawa Timur	2012	19,338,902	2,298.80	13,557.20	4.5
Jawa Timur	2013	19,553,910	3,396.30	12,761.50	7.59
Jawa Timur	2014	19,306,508	1,802.50	14,528.70	7.77
Jawa Timur	2015	19,367,777	2,593.40	13,156.40	3.08
Jawa Timur	2016	19,114,563	1,941.00	13,994.10	2.74
Banten	2007	3,383,661	708.60	579.90	6.31
Banten	2008	3,668,895	477.70	724.90	13.91
Banten	2009	3,704,778	1,412.00	627.2	4.29
Banten	2010	4,583,085	1,544.20	938	10.2
Banten	2011	4,376,110	2,171.70	1,106.50	9.65
Banten	2012	4,662,368	2,716.30	719.80	4.37
Banten	2013	4,687,626	3,720.20	928.4	3.45
Banten	2014	4,853,992	2,034.60	895.8	6.1
Banten	2015	4,825,460	2,542.00	591.2	2.86
Banten	2016	5,088,497	2,912.10	735.3	2.94
Bali	2007	1,982,134	50.40	287.6	5.91
Bali	2008	2,029,730	81.00	267.5	9.25
Bali	2009	2,057,118	227.2	253.6	4.37
Bali	2010	2,177,358	278.3	372.1	8.1
Bali	2011	2,159,158	482.1	375.4	3.75
Bali	2012	2,252,475	482	347	4.71
Bali	2013	2,242,076	390.9	326.6	7.35
Bali	2014	2,272,632	427.1	296.4	8.03
Bali	2015	2,324,805	495.8	254	2.7
Bali	2016	2,416,555	450.6	258.7	2.94
NTB	2007	1,951,182	5.9	1,066.50	8.76
NTB	2008	1,904,781	14.4	741.4	13.01
NTB	2009	1,967,380	2.9	1,243.90	3.34
NTB	2010	2,132,933	220.5	1,994.20	10.08
NTB	2011	1,974,093	465.1	1,136.30	6.55
NTB	2012	2,015,699	635.8	596.2	3.99
NTB	2013	2,032,282	488.2	405.83	9.51
NTB	2014	2,094,100	551.1	316.03	7.23
NTB	2015	2,127,503	699.4	1479.45	3.41
NTB	2016	2,367,310	439	1,585.62	2.61
NTT	2007	2,009,643	0.4	4.2	8.44
NTT	2008	2,086,105	1.4	12.4	10.9

Provinsi	Tahun	PTK	PMA	Ekspor	Inflasi
NTT	2009	2,160,733	4	28.2	6.29
NTT	2010	2,061,229	3.8	32.8	9.73
NTT	2011	2,032,237	5.5	25.7	4.68
NTT	2012	2,120,249	8.7	43.6	5.33
NTT	2013	2,104,507	9.9	19.9	8.41
NTT	2014	2,174,228	15.1	20.8	7.76
NTT	2015	2,219,291	69.9	23.9	4.92
NTT	2016	2,277,068	58.2	33.1	2.48
Kalimantan Barat	2007	2,005,027	11.2	604.2	8.56
Kalimantan Barat	2008	2,040,767	39.8	727.3	11.19
Kalimantan Barat	2009	2,081,211	27.8	393.8	4.91
Kalimantan Barat	2010	2,095,705	170.4	580.9	8.52
Kalimantan Barat	2011	2,158,251	500.7	1,260.80	4.91
Kalimantan Barat	2012	2,196,455	397.5	964.1	6.62
Kalimantan Barat	2013	2,172,337	650	893.5	9.48
Kalimantan Barat	2014	2,226,510	966.1	596.5	9.38
Kalimantan Barat	2015	2,235,887	1,335.70	495.8	6.17
Kalimantan Barat	2016	2,287,823	630.7	459	3.88
Kalimantan Tengah	2007	966,010	77.6	0	7.96
Kalimantan Tengah	2008	982,198	62.7	0	11.65
Kalimantan Tengah	2009	998,967	4.9	2,990.10	2.09
Kalimantan Tengah	2010	1,022,580	546.6	4,113.50	9.51
Kalimantan Tengah	2011	1,079,036	543.7	6,107.60	4.55
Kalimantan Tengah	2012	1,112,252	524.7	5,943.30	5.85
Kalimantan Tengah	2013	1,124,017	481.6	5,654.70	6.79
Kalimantan Tengah	2014	1,154,489	951	4,493.00	7.07
Kalimantan Tengah	2015	1,214,681	933.6	8,144.90	4.74
Kalimantan Tengah	2016	1,248,189	408.2	7,720.90	2.11
Kalimantan Selatan	2007	1,598,981	59.8	2,748.60	7.78
Kalimantan Selatan	2008	1,670,139	0.2	3,512.10	11.62
Kalimantan Selatan	2009	1,705,905	171.8	5,561.30	3.86
Kalimantan Selatan	2010	1,743,622	202.2	6,339.70	9.06
Kalimantan Selatan	2011	1,776,088	272.1	9,617	3.98
Kalimantan Selatan	2012	1,833,892	272.3	9,476.50	5.96
Kalimantan Selatan	2013	1,830,813	260.6	8,481.70	6.98
Kalimantan Selatan	2014	1,867,462	502.5	7,931.20	7.16
Kalimantan Selatan	2015	1,889,502	961.2	3,564.40	5.14

Provinsi	Tahun	PTK	PMA	Ekspor	Inflasi
Kalimantan Selatan	2016	1,965,088	249.4	3,327.20	3.57
Kalimantan Timur	2007	1,091,625	152	15,840.40	8.3
Kalimantan Timur	2008	1,259,587	12.6	23,300.50	13.06
Kalimantan Timur	2009	1,302,772	79.9	16,380.50	4.31
Kalimantan Timur	2010	1,481,898	1,092.20	21,823	7.28
Kalimantan Timur	2011	1,521,316	602.4	33,030.80	6.35
Kalimantan Timur	2012	1,607,526	2,014.10	28,747	5.6
Kalimantan Timur	2013	1,603,915	1,335.40	26,109.50	9.65
Kalimantan Timur	2014	1,677,466	2,145.70	21,476	7.66
Kalimantan Timur	2015	1,423,957	2,381.40	12,546	4.89
Kalimantan Timur	2016	1,581,239	1,139.60	9,175.50	3.39
Sulawesi Utara	2007	908,503	9.70	501.70	10.13
Sulawesi Utara	2008	912,198	35.50	645.30	9.71
Sulawesi Utara	2009	940,173	57.7	396	2.31
Sulawesi Utara	2010	936,939	226.8	373.6	6.28
Sulawesi Utara	2011	953,546	220.2	744	0.67
Sulawesi Utara	2012	973,035	46.7	941.8	6.04
Sulawesi Utara	2013	965,457	65.7	665.4	8.12
Sulawesi Utara	2014	980,756	98.4	833.3	9.67
Sulawesi Utara	2015	1,000,032	88	676.7	5.56
Sulawesi Utara	2016	1,110,564	382.8	693.4	0.35
Sulawesi Tengah	2007	1,083,944	7.1	197.8	8.13
Sulawesi Tengah	2008	1,131,706	1.5	307	10.4
Sulawesi Tengah	2009	1,149,718	3.3	244.1	5.73
Sulawesi Tengah	2010	1,164,226	138.5	320.4	6.4
Sulawesi Tengah	2011	1,211,745	370.4	147.1	4.47
Sulawesi Tengah	2012	1,224,095	806.5	85.1	5.87
Sulawesi Tengah	2013	1,239,122	855	38.8	7.57
Sulawesi Tengah	2014	1,293,226	1,494.20	118.6	8.85
Sulawesi Tengah	2015	1,327,418	1,085	340.2	4.17
Sulawesi Tengah	2016	1,459,803	1,600.30	364.4	1.49
Sulawesi Selatan	2007	2,939,463	62.80	2,740.20	5.71
Sulawesi Selatan	2008	3,136,111	27.90	2,100	11.79
Sulawesi Selatan	2009	3,222,256	77	1,276.70	3.24
Sulawesi Selatan	2010	3,272,365	441.8	2,312	6.82
Sulawesi Selatan	2011	3,326,880	89.6	1,898.60	2.87
Sulawesi Selatan	2012	3,421,101	582.6	1,516.60	4.57

Provinsi	Tahun	PTK	PMA	Ekspor	Inflasi
Sulawesi Selatan	2013	3,376,549	462.8	1,550.90	6.24
Sulawesi Selatan	2014	3,527,036	280.9	1,736.10	8.51
Sulawesi Selatan	2015	3,485,492	233.3	568.4	5.18
Sulawesi Selatan	2016	3,694,712	372.5	513.6	3.18
Sulawesi Tenggara	2007	894,601	0	405.2	7.53
Sulawesi Tenggara	2008	923,118	0.5	537.80	15.28
Sulawesi Tenggara	2009	950,876	3.6	282.2	4.6
Sulawesi Tenggara	2010	997,678	14	461.9	3.87
Sulawesi Tenggara	2011	954,981	17	758.4	5.09
Sulawesi Tenggara	2012	994,521	35.7	594.3	5.25
Sulawesi Tenggara	2013	997,231	86.4	409.2	5.92
Sulawesi Tenggara	2014	1,037,419	161.8	278.3	7.4
Sulawesi Tenggara	2015	1,074,916	145	128.9	1.64
Sulawesi Tenggara	2016	1,219,548	376.1	107.1	3.07
Gorontalo	2007	362,676	0	0	7.02
Gorontalo	2008	405,126	0	0	9.20
Gorontalo	2009	420,962	0	150.8	4.35
Gorontalo	2010	432,926	0.8	212.1	7.43
Gorontalo	2011	445,242	12.5	584	4.08
Gorontalo	2012	455,322	35.3	805.8	5.31
Gorontalo	2013	458,930	25.7	925.5	5.84
Gorontalo	2014	479,137	4.1	306.3	6.14
Gorontalo	2015	493,687	6.9	1,469.50	4.30
Gorontalo	2016	546,668	12.7	2,345.30	1.30
Sulawesi Barat	2007	444,863	0	19.60	0.00
Sulawesi Barat	2008	473,309	0	25.60	11.66
Sulawesi Barat	2009	488,080	0	60.4	1.78
Sulawesi Barat	2010	514,867	37.3	24	5.12
Sulawesi Barat	2011	537,148	5.6	2.7	4.91
Sulawesi Barat	2012	572,081	0.2	0	3.28
Sulawesi Barat	2013	545,438	2.5	0	5.91
Sulawesi Barat	2014	595,797	16.3	152	7.88
Sulawesi Barat	2015	595,905	2	0	5.07
Sulawesi Barat	2016	624,182	20.6	0	2.23
Maluku	2007	485,308	0	91.7	5.85
Maluku	2008	499,555	0	106.4	9.34
Maluku	2009	533,015	0	69.5	6.48

Provinsi	Tahun	PTK	PMA	Ekspor	Inflasi
Maluku	2010	586,430	2.9	130.4	8.78
Maluku	2011	618,899	11.7	134.9	2.85
Maluku	2012	613,357	8.5	166.7	6.73
Maluku	2013	602,429	52.8	134.3	8.81
Maluku	2014	601,651	13.1	111.6	6.81
Maluku	2015	655,063	82.4	2.8	5.92
Maluku	2016	690,786	102.6	85	3.28
Maluku Utara	2007	372,339	0	486.2	10.43
Maluku Utara	2008	394,557	0	366.40	11.25
Maluku Utara	2009	393,834	5.9	167.6	3.88
Maluku Utara	2010	411,361	246	275	5.32
Maluku Utara	2011	426,466	129.8	487.2	4.52
Maluku Utara	2012	450,184	90.3	368.9	3.29
Maluku Utara	2013	454,978	268.5	569.9	9.78
Maluku Utara	2014	456,017	98.7	11.8	9.34
Maluku Utara	2015	482,543	203.8	0	4.52
Maluku Utara	2016	503,479	438.9	0	1.91
Papua Barat	2007	268,117	2	79.7	10.35
Papua Barat	2008	316,193	0.9	107.90	12.55
Papua Barat	2009	325,759	1	154.4	1.92
Papua Barat	2010	316,547	17.2	244.2	4.48
Papua Barat	2011	331,124	33.1	228.6	3.4
Papua Barat	2012	347,559	32	236.4	4.52
Papua Barat	2013	359,527	54.2	244.6	8.27
Papua Barat	2014	378,436	153.4	156.1	7.98
Papua Barat	2015	380,226	258.6	86.3	2.79
Papua Barat	2016	402,360	514.5	54.2	4.13
Papua	2007	941,100	0.4	3,109.20	0.00
Papua	2008	1,028,023	17.8	2,584.10	20.51
Papua	2009	1,082,028	1.8	3,857.50	7.52
Papua	2010	1,456,545	329.6	5,007.10	4.68
Papua	2011	1,449,790	1,312	3,604.20	3.64
Papua	2012	1,485,799	1,202.40	2,069.20	4.88
Papua	2013	1,559,675	2,360.00	2,672.60	4.63
Papua	2014	1,617,437	1,260.60	1,452.60	5.70
Papua	2015	1,672,480	897	1,900.70	2.77
Papua	2016	1,664,485	1,168.40	1,952.80	5.75

Lampiran B. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3318.056217	(32,294)	0.0000
Cross-section Chi-square	1944.378369	32	0.0000

Cross-section fixed effect test equation:

Dependent Variable: EMP

Method: Panel Least Squares

Date: 03/13/18 Time: 11:28

Sample: 2007 2016

Periods included: 10

Cross-sections included: 33

Total panel (balanced) observations: 330

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2569506.	524920.8	4.895035	0.0000
FDI	2000.638	217.2568	9.208629	0.0000
EXP	-67.33230	32.90030	-2.046556	0.0415
INF	-42124.05	72721.22	-0.579254	0.5628

R-squared	0.232507	Mean dependent var	3319856.
Adjusted R-squared	0.225444	S.D. dependent var	4748821.
S.E. of regression	4179382.	Akaike info criterion	33.34127
Sum squared resid	5.69E+15	Schwarz criterion	33.38732
Log likelihood	-5497.310	Hannan-Quinn criter	33.35964
F-statistic	32.91988	Durbin-Watson stat	0.088453
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran C. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: FEM

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	13.142132	3	0.0043

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
FDI	264.526550	266.456607	0.635643	0.0155
EXP	34.241870	34.567933	0.260472	0.5229
INF	-12077.283	-23066.3229	450.048046	0.6054

Cross-section fixed effect test equation:

Dependent Variable: EMP

Method: Panel Least Squares

Date: 03/13/18 Time: 11:28

Sample: 2007 2016

Periods included: 10

Cross-sections included: 32

Total panel (balanced) observations: 330

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3070622.	44696.36	68.69960	0.0000
FDI	264.5265	20.29369	13.03492	0.0000
EXP	34.24187	6.540242	5.235566	0.0000
INF	-12077.28	4110.606	-2.938078	0.0036

R-squared	0.997881	Mean dependent var	3319856.
Adjusted R-squared	0.997628	S.D. dependent var	4748821
S.E. of regression	231261.6	Akaike info criterion	27.64316
Sum squared resid	1.57E+13	Schwarz criterion	28.05760
Log likelihood	-4525.121	Hannan-Quinn criter	27.80847
F-statistic	3955.222	Durbin-Watson stat	1.161888
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran D. Hasil Regresi Data Panel Menggunakan Fixed Effect

Dependent Variable: EMP

Method: Panel Least Square

Date: 03/08/18 Time: 12:18

Sample: 2007 2016

Periods included: 10

Cross-sections included: 33

Total panel (balanced) observations: 330

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3070624.	44696.33	68.69968	0.0000
FDI	264.5264	20.29370	13.03490	0.0000
EXP	34.24156	6.540240	5.235520	0.0000
INF	-12077.32	4110.609	-2.938084	0.0036

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.997881	Mean dependent var	3319856.
Adjusted R-squared	0.997628	S.D. dependent var	4748821.
S.E. of regression	231261.8	Aike info criterion	27.64316
Sum squared resid	1.57E+13	Schwarz criterion	28.05760
Log likelihood	-4525.121	Hannan-Quinn criter	27.80847
F-statistic	3955.216	Durbin-Watson stat	1.161886
Prob(F-statistic)	0.000000		